FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI DENGAN PERILAKU TIDAK ETIS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

(Studi Kasus pada Dinas dan Badan Kota Semarang)

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Amelia Nadia Rahma

7211414215

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 17 Mei 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

Drs. Fachrurrozie, M.Si.
NIP. 196206231989011001

Pembimbing

Kiswanto S.E., M.Si.
NIP. 198309012008121002

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 4 Juli 2018

Penguji I

Drs. Asrori, M.S.
NIP. 196005051986011001

Penguji II

Badingatus Solikhah, S.E., M.Si., Akt., CA.
NIP. 198501152010122004

Penguji III

Kiswanto, S.E., M.Si.
NIP. 198309012008121002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. Heri Yanto, MBA, PhD.
NIP. 196307181987021001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Amelia Nadia Rahma
NIM	: 7211414215
Tempat Tanggal Lahir	: Semarang, 16 Desember 1995
Alamat	: Jalan Kradenan Lama No. 7 Sukorejo, Gunungpati, Semarang

menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 04 Juli 2018

Amelia Nadia Rahma
NIM. 7211414215

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Q.S. Al-Baqarah: 286).

"Lakukan yang terbaik, sehingga aku tak akan menyalahkan diriku sendiri atas segalanya." (Magdalena Neuner).

Persembahan

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Sudarto, Ibu Tri Nurdyastuti, Adek Adyatma, dan keluarga besar yang telah mendukung dan menyayangi penulis.
2. Keluarga Besar Akuntansi D 2014
3. Almamaterku, Universitas Negeri Semarang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PRAKATA

Segala puji syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akutansi dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening". Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, motivasi, semangat, dan bantuan dari berbagai pihak yang selama ini membantu Penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang berkenan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.
2. Drs. Heri Yanto, MBA, PhD., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas selama penyusunan skripsi.
3. Drs. Fachrurrozie, M.Si., Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin untuk menyusun skripsi.
4. Drs. Asrori, M.S., Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan dan penilaian dalam penyusunan skripsi.
5. Kiswanto S.E., M.Si., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, motivasi, dan saran kepada Penulis.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

6. Badingatus Solikhah, S.E., M.Si., Akt., CA., Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan dan penilaian dalam penyusunan skripsi.
7. Linda Agustina, S.E., M.Si., Dosen Wali Akuntansi D 2014 yang telah mendampingi Penulis mulai dari awal hingga akhir studi di Universitas Negeri Semarang.
8. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
9. Sahabat dan teman, khususnya Salindri Prawitasari, Ari Rahmawati, Deby Faradina, Ratri Rahmawati, Muzahim Robith, Ridhlo Virnandi, Bulan Karima, Anis Fitriana, dan Putri Srita yang selalu memberikan semangat serta dukungan.
10. Keluarga besar BSO Kewirausahaan Unnes 2016, KKN Lokasi Purbosono 2017, dan teman-teman jurusan akuntansi angkatan 2014 yang telah memberikan semangat dan motivasi bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari skripsi ini mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman Penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan untuk meningkatkan kualitas penulisan di masa yang akan datang. Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak terutama bagi pembaca.

Semarang, Mei 2018

Penulis

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SARI

Rahma, Amelia Nadia. 2018. "Faktor-faktor yang Memengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akutansi dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening". Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Kiswanto S.E., M.Si.

Kata Kunci : Keadilan Distributif; Kecenderungan Kecurangan Akuntansi; Ketaatan Aturan Akuntansi; Perilaku Tidak Etis; Sistem Pengendalian Internal.

Kecurangan dalam lingkup akuntansi, merupakan penyimpangan dari prosedur akuntansi yang diterapkan oleh suatu entitas yang menimbulkan kesalahan pada penyajian laporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Dalam lingkup pemerintahan, kecurangan sangat merugikan kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi para pegawai di instansi pemerintahan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan seperti ketaatan aturan akuntansi, sistem pengendalian internal pemerintah, keadilan distributif, dan perilaku tidak etis.

Populasi penelitian ini terdiri dari pegawai Dinas dan Badan Kota Semarang. Responden sebanyak 87 pegawai instansi pemerintahan yang bekerja pada subbagian keuangan pada Dinas dan Badan Kota Semarang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *full model Structural Equation Modelling (SEM)* dengan alat analisis *smartPLS 3.0*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap perilaku tidak etis. Sistem pengendalian internal pemerintah dan keadilan distributif berpengaruh negatif terhadap perilaku tidak etis. Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap *fraud*, sistem pengendalian internal pemerintah dan keadilan distributif tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap *fraud*. Ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap *fraud* melalui perilaku tidak etis. Sistem pengendalian internal pemerintah dan keadilan distributif berpengaruh negatif terhadap *fraud* melalui perilaku tidak etis.

Saran dalam penelitian ini, diharapkan Dinas dan Badan Kota Semarang melakukan rotasi pegawai setiap maksimal 5 tahun sekali. Penelitian selanjutnya menggunakan *diamond theory* dengan variabel independen lain seperti kompetensi dan posisi dalam pekerjaan karena posisi seseorang dalam instansi dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRACT

Rahma, Amelia Nadia. 2018. "Analysis of Factors Affecting The Tendency of Accounting Fraud with Unethical Behavior as Intervening Variable". Final Project. Department of Accounting. Economics Faculty. Semarang State University. Advisor. Kiswanto, S.E., M.Si.

Keywords: Distributive Justice; Accounting Fraud Trends; Compliance Accounting Rules; Unethical Behavior; Government's Internal Control System.

A fraudulent in the scope of accounting is part of accounting procedures applied by an entity that leads to errors in the presentation of financial statements and misuse of assets. In the scope of the government, fraud is very harmful to the public interest. This study aims to explore the perceptions of employees in government agencies on some factors that are affecting fraudulent tendencies such as compliance with accounting rules, government's internal control systems, distributive justice, and unethical behavior.

The population of this study consisted Office Department and Agency of Semarang with respondents as much as eighty-seven employees of government agencies which are working on the financial subdivision at the Office Department and Agency of Semarang. The technique that is used in this research is purposive sampling. The data were collected by using questionnaire method. Data analysis method used in this research is full model analysis of Structural Equation Modeling (SEM) with smartPLS 3.0 analysis tool.

The results showed that the compliance accounting rules does not affect the unethical behavior. The government's internal control system and distributive justice have negative effect on unethical behavior. Compliance accounting rules does affect fraud, the government's internal control system and distributive justice does not affect fraud. Unethical behavior has a positive effect on fraud. Compliance accounting rules does not affect fraud through unethical behavior. The government's internal control system and distributive justice have negative effect on fraud through unethical behavior.

Suggestion in this research, Department and Agency of Semarang to rotate the employees every five years. For the further, researcher use diamond theory with other independent variables such as competence and position in the job because the position of someone in the agency can be used to commit fraud.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii
PENGESAHAN KELULUSAN iii
PERNYATAAN.....iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
PRAKATA.....vi
SARI.....viii
ABSTRACT ix
DAFTAR ISI.....x
DAFTAR TABEL.....xiv
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR LAMPIRAN.....xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah.....15
1.3 Cakupan Masalah.....17
1.4 Perumusan Masalah 17
1.5 Tujuan Penelitian 18
1.6 Manfaat Penelitian 19
1.7 Orisinalitas Penelitian 20
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 22
2.1 Landasan Teori.....22
2.1.1 *Fraud Triangle Theory*.....22
2.1.2 Teori Pengembangan Moral 25
2.2 Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.....29
2.3 Perilaku Tidak Etis.....34
2.4 Ketaatan Aturan Akuntansi.....37
2.5 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 40
2.6 Keadilan Distributif 44

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.7 Kajian Penelitian Terdahulu 45
2.8 Kerangka Berpikir.....52
2.8.1 Pengaruh Keataatan Aturan Akuntansi Terhadap Perilaku Tidak Etis.....52
2.8.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Perilaku Tidak Etis 54
2.8.3 Pengaruh Keadilan Distributif Terhadap Perilaku Tidak Etis.....55
2.8.4 Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 56
2.8.5 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 57
2.8.6 Pengaruh Keadilan Distributif Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 58
2.8.7 Pengaruh Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 60
2.8.8 Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Melalui Perilaku Tidak Etis.....60
2.8.9 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Melalui Perilaku Tidak Etis 62
2.8.10 Pengaruh Keadilan Distributif Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Melalui Perilaku Tidak Etis.....63
2.9 Hipotesis Penelitian 64
BAB III METODE PENELITIAN.....66
3.1. Jenis dan Desain Penelitian.....66
3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....66
3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....69
3.3.1. Variabel Independen.....69
3.3.2. Variabel Mediasi.....70
3.3.3. Variabel Dependen 70
3.4. Metode Pengumpulan Data.....73

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3.5. Uji Instrumen 74
3.6. Metode Analisis Data 77
3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif 78
3.6.1.1. Analisis Statistik Karakteristik Responden 78
3.6.1.2. Analisis Statistik Deskriptif Variabel 78
3.6.2. Analisis Statistik Inferensial 82
3.6.2.1. Model Pengukuran atau *Outer Model* 82
3.6.2.2. Model Struktural atau *Inner Model* 83
3.6.2.3. Pengujian Hipotesis 84
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 85
4.1. Hasil Penelitian 85
4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian 85
4.1.2. Proses Penelitian dan Tingkat Pengembalian Kuesioner 85
4.2. Analisis Statistik Desktiptif 86
4.2.1. Analisis Statistik Karakteristik Responden 86
4.2.2. Analisis Statistik Deskriptif Variabel 88
4.3. Analisis Statistik Inferensial 92
4.3.1. Analisis Model Pengukuran atau *Outer Model* 92
4.3.1.1. Uji *Convergent Validity* 92
4.3.1.2. Uji *Composite Reliability* 97
4.3.1.3. Uji *Discriminant Validity* 97
4.3.2. Analisis Model Struktural atau *Inner Model* 98
4.3.3. Pengujian *Structural Equation Model* 99
4.3.4. Pengujian Hipotesis 100
4.4. Pembahasan 106
4.4.1. Analisis Deskripsi Variabel Penelitian 106
4.4.2. Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis 109
BAB V PENUTUP 127
5.1. Simpulan 127
5.2. Saran 129

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA 131
LAMPIRAN 137

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Review Penelitian Sebelumnya 50
Tabel 3.1. Dinas dan Badan di Kota Semarang 67
Tabel 3.2. Prosedur Pengambilan Sampel 68
Tabel 3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 71
Tabel 3.4. *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* 76
Tabel 3.5. *Average Variance Extracted* (AVE) 77
Tabel 3.6. Kategori Variabel Ketaatan Aturan Akuntansi 79
Tabel 3.7. Kategori Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 80
Tabel 3.8. Kategori Variabel Keadilan Distributif 80
Tabel 3.9. Kategori Variabel Perilaku Tidak Etis 81
Tabel 3.10. Kategori Variabel Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 82
Tabel 3.11. Kriteria Hipotesis Ditolak dan Diterima 84
Tabel 4.1. Tingkat Pengembalian Kuesioner Penelitian 86
Tabel 4.2. Ringkasan Karakteristik Responden 87
Tabel 4.3. Statistik Desktiptif Ketaatan Aturan Akuntansi 88
Tabel 4.4. Statistik Desktiptif Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 89
Tabel 4.5. Statistik Desktiptif Keadilan Distributif 90
Tabel 4.6. Statistik Desktiptif Perilaku Tidak Etis 90
Tabel 4.7. Statistik Desktiptif Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 91
Tabel 4.8. *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* 97
Tabel 4.9. AVE 98
Tabel 4.10. *R-Square* 99
Tabel 4.11. *Path Coefficient* (*Mean*, ST-DEV, p-*value*) 101
Tabel 4.12 Hasil Rekapitulasi Pengujian Hipotesis 105

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Data Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi.....6
Gambar 2.1. *Fraud Triangle* 23
Gambar 2.2. Kerangka Berpikir 64
Gambar 4.1. Uji *Full Model* SEM PLS.....100

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 137
Lampiran 2. Hasil Uji Pilot 143
Lampiran 3. Hasil Penelitian Sebelum Direestimasi 146
Lampiran 4. Hasil Penelitian atau Pengujian Hipotesis Setelah Direestimasi 148
Lampiran 5. Hasil Statistik Desktiptif.....151
Lampiran 6. Surat Keterangan 154

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Maraknya kecurangan yang dilakukan oleh berbagai pihak demi kepentingan individu maupun kelompok mendapatkan perhatian dari masyarakat. Kecurangan dilakukan baik oleh pihak golongan kelas bawah maupun golongan kelas atas, yang menyebabkan kerugian bagi entitas maupun pihak lain. Menurut Holmes & Burns (1996) tindak kecurangan (*fraud*) adalah suatu salah saji dari suatu fakta bersifat material yang diketahui tidak benar atau disajikan dengan mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran dengan maksud menipu pihak lain.

Kecurangan dalam lingkup akuntansi, merupakan penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan oleh suatu entitas yang menimbulkan kesalahan pada laporan keuangan yang disajikan dan penyalahgunaan aset pada entitas tersebut (Wulandari dan Ahmad, 2015). Kecenderungan kecurangan akuntansi ditemukan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terkait dengan tidak tepatnya PTN mengelola keuangan (Shintadevi, 2015). Pada sektor swasta, bentuk kecurangan akuntansi terjadi dalam kasus ketidaktepatan dalam membelanjakan sumber dana (Thoyibatun, 2009). Sektor pemerintahan pun tidak luput dari terjadinya kasus kecurangan akuntansi.

Menurut data dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab) tanggal 4 juni 2018, Humas Setkab mempublikasikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintsh Pusat (LKPP) tahun 2017 dari Badan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pemeriksaan Keuangan (BPK). BPK menemukan bahwa dari pemeriksaan 87 entitas pelaporan diperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap 80 kementerian lembaga/bendahara umum negara, wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap 6 kementerian lembaga, dan tidak menyatakan pendapat (TMP) atau *disclaimer* terhadap 2 kementerian lembaga. Permasalahan yang ditemukan pada 8 kemeterian lembaga yang belum mendapatkan opini WTP itu, menurut Ketua BPK, secara umum meliputi permasalahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Belanja Barang, Belanja Modal, Piutang Bukan Pajak, Aset Tetap, Aset Lainnya, dan Utang kepada Pihak Ketiga.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) menjadi tiga kelompok berdasarkan perbuatan diantaranya *asset misappropriation* atau penyimpangan atas aset, *fraudulent statements* atau pernyataan palsu, dan *corruption* atau korupsi dalam (Novikasari, 2017). Penyimpangan atas aset meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan. Bentuk kecurangan ini mudah dideteksi karena bersifat *tangible* atau dapat dihitung. Pernyataan palsu atau salah memberikan pernyataan meliputi tindakan yang dilakukan pejabat atau eksekutif suatu instansi pemerintah atau perusahaan utnuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa dalam menyajikan laporan keuangan agar memperoleh laba. Korupsi merupakan jenis kecurangan yang sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama sama dengan pihak di luar instansi atau perusahaan.

Variasi kecurangan di Indonesia, lebih dikenal dengan istilah KKN atau Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjelaskan bahwa korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan (uang negara) untuk kepentingan pribadi atau orang lain, kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara, sedangkan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Indonesia memiliki tingkat korupsi yang tinggi, hal tersebut tidak hanya dipersepsikan oleh masyarakat dalam negeri tetapi juga masyarakat luar negeri. *Transparency International* (TI) merupakan organisasi internasional di bidang akuntabilitas di mana menerbitkan *Corruption Perceptions Index* (CPI). TI menghitung CPI dengan cara memberi nilai atau skor dari 0 (*highly corrupt*) sampai dengan 100 (*very clean*). Skor CPI Indonesia tidak mengalami perubahan pada tahun 2016 dan 2017 yaitu sebesar 37. Sebagai perbandingan, skor tersebut masih sangat jauh dibandingkan dengan skor CPI tahun 2017 yang diperoleh Negara New Zealand dan Denmark yaitu sebesar 89 dan 88 yang mana

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

menempati peringkat 1 dan 2. Untuk kawasan ASEAN, negara yang menduduki peringkat tertinggi yaitu Singapura dengan skor 84 menduduki peringkat 6. Negara Brunei Darussalam (skor 62, peringkat 31), atau Malaysia (skor 47, peringkat 62).

Salah satu penyebab Indonesia mendapatkan skor dan peringkat yang rendah adalah tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Pernyataan tersebut didukung dengan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) melalui Tren Penegakan Hukum Kasus Korupsi 2017. ICW merupakan sebuah organisasi non-pemerintah yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2017, Indonesia mengalami kerugian negara sejumlah 6,5 triliun rupiah yang disebabkan oleh 576 kasus korupsi diantaranya penyalahgunaan anggaran, *mark up*, pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, laporan fiktif, proyek fiktif, penggelapan, suap, pemotongan, pemerasan, dan *mark down*. Laporan ICW menampilkan lima besar sektor yang paling merugikan negara akibat korupsi. Pertama, sektor anggaran desa di mana terdapat sebanyak 98 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar 39,3 miliar rupiah. Kedua, sektor pemerintahan yang menjadi peluang cukup besar untuk dikorupsi dengan kerugian negara sebesar 255 miliar rupiah. Ketiga, sektor pendidikan dengan jumlah nilai kerugian negara sebesar 81,8 miliar rupiah. Keempat, sektor transportasi dengan nilai kerugian negara hingga 985 miliar rupiah. Terakhir yaitu sektor sosial kemasyarakatan, yakni kasus korupsi berkaitan dengan dana bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat dengan jumlah nilai kerugian negara sebesar 41,1 milyar rupiah.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Indonesia Corruption Watch (ICW) melansir hasil survei soal tren penegakkan hukum kasus korupsi. Hasilnya, tersangka kasus korupsi dengan latar belakang Aparatur Sipil Negara (ASN) menempati urutan teratas selama tahun 2017 dengan jumlah tersangka sebanyak 495 orang. Diikuti oleh pihak swasta sebanyak 241 orang dan kepala desa sebanyak 102 orang tersangka. Data tersebut menunjukkan perubahan ketimbang pada tahun 2016 di mana ASN juga menjadi tersangka teratas kasus korupsi sebanyak 515 orang. Tetap saja persentase ASN sebagai tersangka korupsi selama tahun 2017 masih tinggi yaitu sebesar 44%.

Pernyataan lain yang mendukung tingginya korupsi di Indonesia yaitu data Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Per 31 Desember 2017, di tahun 2017 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 123 perkara, penyidikan 121 perkara, penuntutan 103 perkara, *inkracht* 84 perkara, dan eksekusi 83 perkara. Korupsi yang terjadi pada sektor publik di Indonesia, dilakukan oleh berbagai macam lembaga atau instansi. Gambar 1.1 Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi, yang diterbitkan olehKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui *Anti-Corruption Clearing House*, yang dirancang sebagai sumber pengetahuan dan informasi yang terdistribusi secara terbuka untuk publik atau *public knowledge management* dalam upaya membangun semangat, visi, dan budaya antikorupsi.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

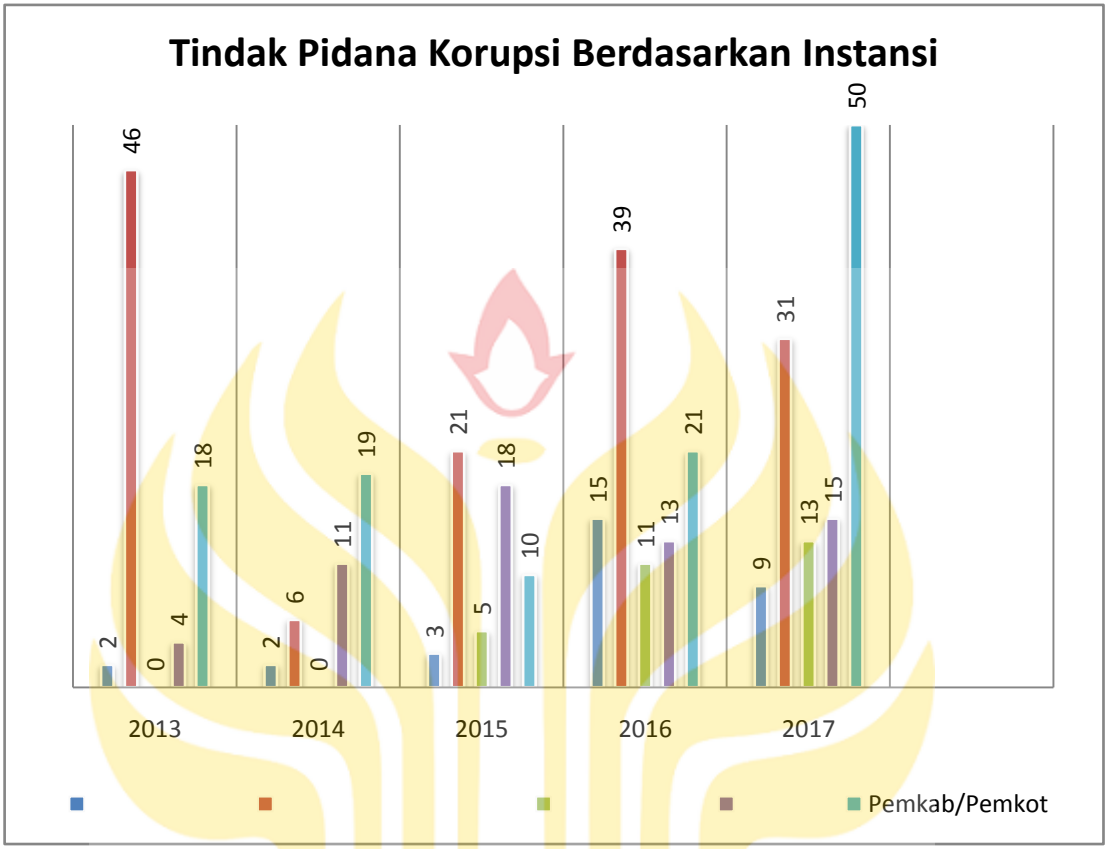

Gambar 1.1
Data Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi
Sumber: AACH Komisi Pemberantasan Korupsi (aach.kpk.go.id)

Berdasarkan gambar 1.1 dapat disimpulkan bahwa instansi pemerintahan yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi selama 5 tahun terakhir yaitu Kementerian atau lembaga dengan kasus sebanyak 143. Kemudian disusul oleh instansi Pemerintah Kota atau Pemerintah Kabupaten sejumlah 114 kasus korupsi.

Kasus korupsi yang masih terus dilakukan pengembangan di tahun 2017 yaitu pengadaan KTP-elektronik dengan menetapkan tersangka baru yaitu anggota DPR fraksi Golkar, ketua DPR fraksi Golkar, dan Mantan Direktur Utama PT Quadra Solution di mana sebelumnya telah menetapkan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil dan stafnya, sebagai tersangka dengan perkara korupsi yang

merugikan negara setidaknya 2,3 triliun rupiah (news.detik.com). Tahun 2011 terjadi korupsi pengadaan simulator surat izin mengemudi dengan tersangka mantan Korlantas serta Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia dengan kerugian negara sebesar 121 miliar rupiah (boombastis.com).

Ada pula kasus korupsi sepanjang tahun 2016 hingga 2017 yang menyeret nama kepala daerah antara lain Bupati Subang yang tertangkap karena memberikan suap sebesar 200 juta rupiah kepada jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Gubernur Bengkulu tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) karena menerima suap terkait proyek pembangunan jalan tahun anggaran 2017, Bupati Buton tersangka pemberi suap terkait sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), kasus Bupati Banyuasin, Wali Kota, dan kasus Bupati Sabu dengan dugaan penyalahgunaan wewenangan (jawapos.com).

Menurut *Indonesia Corruption Watch (ICW)* selama tahun 2017 Provinsi Jawa Tengah termasuk 10 provinsi dengan kasus korupsi terbanyak sebesar kurang lebih 29 kasus dan kerugian sebesar 40,3 miliar rupiah. Anggota Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah (Jateng), Ronny Maryanto mengungkapkan sebanyak 32 kepala daerah di Jateng tersandung kasus korupsi semenjak digelarnya pemilihan kepada daerah (pilkada) secara langsung. Kondisi itu menandakan demokrasi yang terjadi di Indonesia rawan dengan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (mediaindonesia.com).

Kasus korupsi di Jawa Tengah diantaranya kasus dugaan suap sebesar 51,3 miliar rupiah yang dilakukan Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno terkait

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

pengelolaan jasa kesehatan RSUD Kardinah Kota Tegal. Lalu kasus Bupati Klaten Nonaktif, yang tersandung kasus suap dan gratifikasi. diringkus dalam operasi tangkap tangan KPK pada akhir 2016 di rumah dinasnya. Kasus korupsi lainnya yaitu Bupati Kebumen sebagai penerima suap dan gratifikasi 2,3 miliar rupiah terkait proyek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen (daerah.sindonews.com). Adapun kasus korupsi yang dilakukan kepala desa di daerah Purwokerto di mana dua kepala desa serta bendahara dan sekretaris desa ditahan Kejaksaan Negeri Purwokerto, karena terbukti menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa hingga ratusan juta rupiah untuk keperluan pribadi. Mereka terjerat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimal empat tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Kerugian Negara yang telah diakibatkan sebesar 428 juta rupiah.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah Murdoko dituntut oleh jaksa penuntut umum pada KPK7 tahun dan 6 bulan penjara. Jaksa menilai Murdoko telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kendal tahun 2003, tindak pidana korupsi itu dilakukan Murdoko yakni dengan meminta Bupati Kendal periode 2000-2005, dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kendal periode 2002-2006, memindahkan uang senilai 4,75 miliar rupiah secara bertahap ke rekening pribadinya (kpk.go.id). Kasus lain yang menyeret anggota DPRD Jawa Tengah tahun 2016 Mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah (Jateng), dihukum 5 tahun penjara karena melakukan korupsi sebesar 127

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

jutarupiah. Kasus yang membelit Mantan Wakil Ketua DPRD Jateng adalah kucuran dana bantuan sosial untuk bidang keagamaan pada masa APBD 2008 di mana anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN) korupsi renovasi 19 masjid di Magelang (news.detik.com).

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2017, Kota Semarang berada pada peringkat 9 dari 12 Kota di Indonesia dengan poin 58,9. Kota Semarang masih berada di bawah rata-rata persepsi korupsi tahun 2017 yang berada pada poin 60,8, yang mana pada rentang 0-100, poin 58,9 ini menandakan berada tipis di atas rata-rata. Sektor yang paling besar terdampak korupsi yaitu sektor perizinan disusul dengan sektor penerbitan kuota perdagangan. Integritas publik memiliki relasi yang erat dengan potensi korupsi. Daerah dengan integritas publik yang buruk memiliki potensi korupsi yang tinggi. Pada Kota Semarang Dinas Tata Ruang dan Bangunan memiliki probabilitas suap paling tinggi disusul dengan Kepolisian, Dinas Pekerjaan Umum, dan Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Pilar sistem integritas lokal merupakan pilar yang diharapkan dapat berkontribusi besar dalam upaya pemberantasan korupsi. Pemerintah Pusat, Kepala Daerah, dan Pengadilan juga dianggap sebagai pilar sistem integritas yang mampu menurunkan risiko korupsi. Kombinasi antar pilar yang dimiliki oleh kepala daerah maupun pemerintah pusat membuka harapan yang besar bagi upaya pemberantasan korupsi di daerah, akan tetapi, berdasarkan hasil IPK tahun 2017 kepala daerah dan pengadilan memiliki poin 3,3 dan 3,2 yang mana poin tersebut tergolong rendah untuk mencegah dan memberantas korupsi.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KPK menyatakan bahwa Sekretaris Daerah (non-aktif) Kota Semarang terjerat kasus suap kepada anggota DPRD demi pemulusan pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2012 (kpk.go.id). Tindak kecurangan yang lain adalah pada tahun 2015 tim penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polrestabes Semarang, Jawa Tengah menyita uang 514 juta rupiah dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Semarang. Uang tersebut disita dari tiga rekening misterius atas nama Kas Daerah (Kasda) Pemerintah Kota Semarang. Kasus tersebut melibatkan mantan bankir BTPN Semarang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kas Daerah Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, atas pasal gratifikasi (merdeka.com). Adapun kasus Mantan Kepala Perum Perhutani Unit I Jateng segera diadili atas kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk urea tablet di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK tersebut terjadi pada kurun waktu 2010 hingga 2013. Pengungkapan kasus itu bermula dari pengembangan penyidikan terhadap PT Berdikari. Selain Kepala Perum Perhutani Jawa Tengah, KPK juga menetapkan dua mantan Direktur Utama PT Berdikari dan dua mantan Kepala Biro Pembinaan Sumber Daya Hutan Perum Perhutani Unit I Jateng sebagai tersangka (solopos.com).

Pemerintahan sebagai pengemban kepercayaan dari masyarakat mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, salah satunya adalah memastikan bahwa keuangan negara terkelola dengan baik dan *accountable*. Namun pada pelaksanaannya banyak terjadi praktek *fraud* yang secara langsung dapat merugikan negara dan secara tidak langsung dapat

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

merugikan masyarakat. Maraknya pengungkapan praktek-praktek *fraud* terutama korupsi dipemerintahan menunjukkan dua sisi realitas pelaksanaan pemerintahan (Adinda & Ikhsan, 2013).

Terjadinya kecurangan dalamakuntansi disebabkan adanya tigakondisi yang biasa disebut dengan *Fraud Triangle* (Segitiga Kecurangan) Arens (2008: 432), yaitu insentif atau tekanan, kesempatan, dan sikap atau rasionalisasi. Insentif atau tekanan yang dirasakan oleh seseorang menyebabkan orang tersebut melakukan tindak kecurangan. Kesempatan dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang memberikan celah atau peluang sesorang untuk melakukan kecurangan sedangkan, sikap atau rasionalisasi adalah sebuah sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membenarkan seseorang melakukan suatu tindak kecurangan atau orang tersebut berada pada lingkungan yang menekan sehingga merasionalisasi tindak kecurangan (Rahmaidha & Sukirno, 2017).

Tekanan (*Pressure*) adalah keinginan karyawan untuk bertindak fraud karena adanya tekanan dari pihak internal maupun eksternal (Pramudita, 2013). Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kondisi tersebut dalam lingkup entitas pemerintahan yaitu keadilan distributif. Apabila karyawan merasa ketidakadilan didalam suatu organisasi maka akan mengakibatkan karyawan merasakan tidak dihargai dan merasakan lingkungan kerja yang kurang kondusif sehingga dapat menimbulkan kemarahan, kebencian dan pemberontakan serta protes terhadap organisasi tempat ia bekerja. Hal inilah yang dapat memberikan tekanan atau mendorong seseorang untuk mengambil tindakan yang menyimpang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

atau tidak sesuai dari aturan yang berlaku demi kepuasannya tercapai seperti berbuat kecurangan (Sumbayak, Anisma, & Hasan, 2017).

Kesempatan (*opportunity*) merupakan suatu kondisi yang memungkinkan seseorang bisa melakukan kecurangan. Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kondisi tersebut dalam lingkup entitas pemerintahan yaitu sistem pengendalian internal. Penerapan pengendalian internal efektif yang didukung dengan regulasi yang memadai akan mencegah berbagai bentuk persoalan dan ketidakwajaran yang merugikan berbagai pihak yang berkepentingan. Sistem pengendalian internal yang rendah dan kepatuhan karyawan terhadap pengendalian internal yang juga rendah dapat menjadi pemicu terjadinya kecurangan (*Fraud*) di sektor pemerintahan (Widyaswari, Yuniarta, & Sujana, 2017).

Sikap atau rasionalisasi menyebabkan pelaku kecurangan membenarkan perbuatannya. Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kondisi tersebut dalam lingkup entitas pemerintahan yaitu perilaku tidak etis. Dilema etik sering muncul ketika pada saat yang sama manajemen dituntut meningkatkan keuntungan organisasi dan memaksimalkan manfaat yang bisa diperoleh konsumen melalui produk yang dihasilkan organisasi. Keadaan demikian melahirkan perilaku tidak etis dan berbagai kebijakan bias. Perilaku tidak etis seharusnya tidak bisa diterima secara moral karena mengakibatkan bahaya bagi orang lain dan lingkungan (Beu dan Buckley, 2001 dalam Thoyibatun, 2012).

Teori lain yang digunakan adalah teori perkembangan moral yang kembangkan Kohlberg (1969) mengenai ukuran dari tinggi rendahnya moral

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya seperti yang diungkapkan. Terdapat enam tahapan yang dibagi ke dalam tiga tingkatan: pra-konvensional, konvensional, dan pasca-konvensional. Teori ini berpandangan bahwa penalaran moral, yang merupakan dasar dari perilaku etis. Manajemen pada tahap konvensional mulai membentuk moralitas manajemennya dengan membuat dan memelihara aturan yang dalam penelitian ini adalah aturan akuntansi yang dilanjutkan hingga tahap kematangan moral manajemen yang tinggi yaitu tahap pasca konvensional. Ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian prosedur pengelolaan aset organisasi, pelaksanaan prosedur akuntansi, dan penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya, dengan aturan yang ditentukan oleh BPK dan/atau SAP (PP RI Nomor 24/2005). Suatu instansi atau lembaga akan melakukan tindakan kecurangan karena mereka tidak berpedoman pada aturan akuntansi yang berlaku (Bartenputa, 2016).

Beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan kecurangan. Penelitian Nurlaeliyah & Anisykurlillah (2017) menunjukkan perilaku tidak etis memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, efektivitas pengendalian internal memiliki efek negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi dan kepatuhan terhadap aturan akuntansi tidak berpengaruh pada kecurangan akuntansi. Efektivitas pengendalian internal memiliki efek negatif pada perilaku yang tidak etis, sementara kepatuhan aturan akuntansi tidak berpengaruh pada perilaku yang tidak etis. Perilaku tidak etismemediasi pengaruh efektivitas pengendalian internal

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Perilaku tidak etis tidak dapat memediasi pengaruhkepatuhan dengan aturan akuntansi pada kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian dari Ade (2017) menunjukkan bahwa ketaatan akuntansi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Arista, Titisari, & Suhendro, (2016) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi, tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Wulandari & Suryandari, (2016) menunjukkan bahwa keadilan distributif berpengaruh positif terhadap *fraud*. Penelitian lainnya yaitu Yulianti, P, & Rofika, (2016) menunjukkan keadilan distributif dengan kecenderungan kecurangan akuntansi berpengaruh negatif. Pengujian keadilan distributif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dimediasi oleh perilaku tidak etis yaitu berpengaruh negatif.

Perbedaan hasil penelitian-penelitian sebelumnya serta didukung oleh permasalahan yang sedang terjadi mendorong peneliti untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian ini mengambil variabel Ketaatan Aturan Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Keadilan Distributif, Perilaku Tidak Etis, dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Perilaku tidak etis sebagai variabel intervening yang menjembatani hubungan variabel independen dengan variabel dependen di mana pemunculan variabel berasal dari asumsi bahwa variabel independen memiliki hubungan kausal dengan variable dependen.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Objek dari penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada Dinas dan Badan Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang. Pemilihan objek didukung dengan hasil survei dari ICW yang menjelaskan bahwa tersangka kasus korupsi dengan latar belakang ASN merupakan pihak yang paling banyak melakukan kecurangan. Objek penelitian juga merupakan ASN yang khususnya berkerja di bagian keuangan karena mereka memiliki akses istimewa ke informasi milik organisasi dan atasan sehingga mereka berada dalam posisi terbaik untuk menjumpai praktik ilegal dalam organisasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini penulis melakukan sebuah penelitian yang berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel *Intervening*"

1.2. Identifikasi Masalah

Kecenderungan kecurangan akuntansi merupakan isu yang masih berkembang di Indonesia, dan perlu diperhatikan lagi agar dapat berkurang. Berikut ini hasil kajian riset terdahulu yang menjadi beberapa masalah yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi:

a. Ketaatan aturan akuntansi yaitu taat atau patuh padaaturan akuntansi yang dijadikan standar dalam pengeukuran dan penyajian laporan keuangan. Dinyatakan menaati aturan akuntansi jika organisasi telah menerapkan persyaratan pengungkapan, menyajikan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan publik, objektif, memenuhi syarat kehati-hatian dan memenuhi konsep konsistensi penyajian (PSAK No. 1, IAI, 2001).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

b. Sistem pengendalian internal yaitu sistem pengendalian internal yang sejalan dengan kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang berlaku dalam organisasi. Semakin kuat sistem pengendalian internal, akan semakin rendah tingkat terjadinya *fraud* sebaliknya, semakin lemah sistem pengendalian internal maka, tingkat *fraud* akan meningkat.

c. Asimetri informasi yaitu adanya ketidakselarasan antara pihak yang menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi. Kondisi tersebut terjadi di mana salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki informasi yang lebih banyak dari pihak lainnya.

d. Keadilan distributif yaitu berkaitan dengan distribusi keadaan dan barang yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan individu. Keadilan distributif pada dasarnya dapat tercapai bila penerimaan dan masukan antara dua orang sebanding.

e. Keadilan prosedural yaitu pertimbangan yang dibuat oleh karyawan mengenai keadilan proses dan prosedur organisasi untuk menghasilkan keputusan alokasi dan sumber daya.

f. Komitmen organisasi yaitu sikap mental individu berkaitan dengan tingkat keloyalannya terhadap organisasi tempat individu tersebut bekerja. Keinginan untuk tetap ada dalam organisasi agar tujuan dan kepentingan organisasi tersebut tercapai.

g. Perilaku tidak etis yaitu perilaku yang menyimpang atau tidak etis dalam organisasi. Terdiri dari penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan sumber daya serta perilaku tidak berbuat apa-apa.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

h. Budaya organisasi yaitu kultur organisasi yang merupakan nilai, norma, dan konsep dasar dianut oleh anggota organisasi yang mempengaruhi perilaku dan cara kerja anggota organisasi.

i. Level penalaran moral yaitu moralitas yang merupakan faktor penting dalam timbulnya kecurangan. Semakin tinggi level penalaran moral maka, individu akan semakin mungkin untuk melakukan hal yang benar sebaliknya, apabila individu memiliki level penalaran moral yang rendah akan memungkinan untuk melakukan kecurangan.

1.3. Cakupan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, peneliti memberikan ruang lingkup yang akan dikaji dalam penelitian. Cakupan masalah yang akan dikaji adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ASN untuk melakukan kecurangan akuntansi. Penelitian yang diajukan adalah untuk menguji pengaruh ketaatan aturan akuntansi, sistem pengendalian internal pemerintah, keadilan distributif, dan perilaku tidak etis terhadap kecenderungan ASN untuk melakukan kecurangan akuntansi. Peneliti mengambil sampel pada ASN yang bekerja di Sub Bagian Keuangan pada Dinas dan Badan Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang.

1.4. Perumusan Masalah

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka maka rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah:

a. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap perilaku tidak etis?

b. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap perilaku tidak etis?

c. Apakah keadilan distributif berpengaruh signifikan terhadap perilaku tidak etis?

d. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud)*?

e. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan *(fraud)*?

f. Apakah keadilan distributif berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud)*?

g. Apakah perilaku tidak etis berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud)*?

h. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud)* melalui perilaku tidak etis?

i. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan *(fraud)* melalui perilaku tidak etis?

j. Apakah keadilan distributif berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan *(fraud)* melalui perilaku tidak etis?

1.5. Tujuan Penelitian

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap perilaku tidak etis.

b. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap perilaku tidak etis.

c. Untuk mengetahui pengaruh keadilan distributif terhadap perilaku tidak etis.

d. Untuk mengetahui pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud)*.

e. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud)*.

f. Untuk mengetahui pengaruh keadilan distributif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud)*.

g. Untuk mengetahui pengaruh perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud)*.

h. Untuk mengetahui pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud)* melalui perilaku tidak etis.

i. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kecenderungan kecurangan *(fraud)* melalui perilaku tidak etis.

j. Untuk mengetahui pengaruh keadilan distributif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud)* melalui perilaku tidak etis.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan diatas, peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi para pembaca.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.6.1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan penulis dan pembaca mengenai penelitian tentang faktor yang mempengaruhi kecurangan akuntansi.

b. Penelitian ini diharapkan mampu sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya mengenai faktor yang mempengaruhi kecurangan akuntansi.

1.6.2. Manfaat Praktik

a. Bagi instansi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan untuk mendorong karyawan dalam menanamkan sikap dan perilaku etis dalam rangka meminimalisir tindakan kecurangan yang terjadi pada instansi.

b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan mereka akan lebih memahami mengenai kecurangan akuntansi yang terjadi sehingga pada kemudian hari ketika mereka terjun ke dalam profesi akuntan dapat terhindar dari sifat krisis etis profesional.

1.7. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai faktor yang memengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi merupakan gabungan dari beberapa studi yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Peneliti mengambil faktor-faktor seperti ketaatan aturan akuntansi, sistem pengendalian internal, dan keadilan distributif sebagai variabel bebas serta perilaku tidak etis sebagai variabel *intervening* dalam penelitian ini.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Perbedaan hasil penelitian terdahulu memungkinkan penulis untuk menguji kembali variabel-variabel tersebut.

Penelitian ini menggunakan variabel keadilan distributif sebagai pembeda, di mana jarang terdapat peneliti yang melakukan penelitian pengaruh keadilan distributif terhadap perilaku tidak etis serta pengaruh keadilan distributif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan perilaku tidak etis sebagai variabel *intervening*.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Fraud Triangle Theory*

Teori *Fraud Triangle* yang dikembangkan oleh Cressey (1953), mengatakan bahwa *fraud* disebabkan oleh tiga faktor. Ketiga faktor tersebut yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan dan digambarkan dalam konsep segitiga kecurangan. Menurut Andon, Free, & Scard (2015) menjelaskan asal-usul dari segitiga kecurangan merupakan karya dari kriminolog Amerika bernama Donald Cressey, yang melakukan 133 wawancara dengan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Negara, Illinoisn, di mana narapidana dihukum karena kasus penggelapan. Berdasarkan wawancara tersebut, Cressey (1950, 1953) mengungkapkan hipotesis yaitu tiga kriteria untuk pelanggaran kriminal kepercayaan: (1) masalah keuangan yang tidak dapat dibagikan; (2) pengetahuan tentang cara kerja perusahaan tertentu dan peluang untuk melanggar posisi kepercayaan; dan (3) kemampuan untuk menyesuaikan persepsi diri seseorang sedemikian rupa sehingga melanggar kepercayaan ini tidak merupakan dalam pikiran individu. Cressey (1950) dan mentornya Sutherland (1940, 1941) dalam Schuchter & Levi (2016) menemukan sebutan umum untuk agregat kejahatan semacam ini tanpa kekerasan fisik yaitu pelanggaran kepercayaan, yang digambarkan sebagai karakteristik paling umum tetapi tidak universal dari kejahatan kerah putih.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Cressey (1953) dalam Tuannakotta (2007) menyimpulkan bahwa kecurangan secara umum mempunyai tiga sifat umum. *Fraud triangle* terdiri dari tiga kondisi yang umumnya hadir pada saat *fraud* terjadi yaitu *pressure, opportunity,* dan *rationalization*.

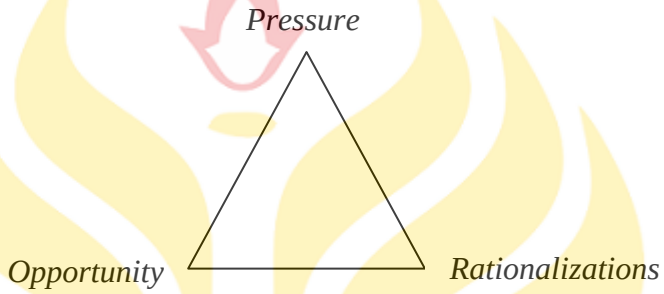

Gambar 2.1
Fraud Triangle
Sumber : *Fraud Triangle Theory* oleh Cressey (1953) dalam Norbarani(2012)

a. Tekanan atau *pressure*

Tekanan *(Pressure)* adalah motivasi dari individu karyawan untuk bertindak *fraud* yang disebabkan oleh adanya tekanan, baik tekanan finansial maupun non finansial, serta dapat disebabkan pula oleh tekanan pribadi maupun tekanan dari organisasi (Pristiyanti, 2012). Sesuai dengan pendapat Sukirman & Sari (2013) faktor finansial muncul karena keinginan untuk memiliki gaya hidup yang berkecukupan secara materi sedangkan, faktor non finansial bisa mendorong seseorang melakukan *fraud*, yaitu tindakan untuk menutupi kinerja yang buruk. Dalam SAS No. 99, terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada tekanan atau *pressure* yang dapat mengakibatkan kecurangan. Kondisi tersebut adalah *financial stability, external pressure, personal financial need* dan *financial targets.*

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

b. Kesempatan atau *opportunity*

Menurut Pristiyanti (2012) peluang *(Opportunity)* adalah faktor penyebab korupsi yang disebabkan karena adanya kelemahan di dalam suatu sistem, di mana seorang karyawan mempunyai kuasa atau kemampuan untuk memanfaatkan kelemahan yang ada, sehingga ia dapat melakukan perbuatan curang. SAS no. 99 menyebutkan bahwa peluang pada *financial statements fraud* dapat terjadi pada tiga kategori. Kondisi tersebut adalah *nature of industry, ineffective monitoring, dan organizational structure.*

c. *Rationalizations*

Menurut Pramudita (2013) rasionalisasi *(rationalization)* adalah pertimbangan perilaku kecurangan sebagai konsekuensi dari kesenjangan integritas pribadi karyawan atau penalaran moral yang lain. Rasionalisasi juga merupakan sebuah sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membenarkan seseorang melakukan suatu tindak kecurangan atau orang tersebut berada pada lingkungan yang menekan sehingga merasionalisasi atau membenarkan tindak kecurangan (Norbarani, 2012).

Fraud Triangle Theory menjelaskan 3 faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kecurangan yaitu tekanan dan kesempatan. Ketiga faktor tersebut memunculkan variabel-variabel dalam penelitian yaitu:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

a. Keadilan distributif

Persepsi keadilan dalam pendistribusian gaji dan kompensasi berkaitan dengan unsur *fraud triangle theory* memproksikan faktor tekanan. Rae & Subramaniam (2008) menyatakan bahwa tekanan karyawan yang

melakukan kecurangan sebagai akibat dari keserakahan atau tekanan *financial* di antara berbagai macam alasan sehingga keadilan distributif yang sudah terpenuhi maka dapat mengurangi kecenderungan kecurangan namun apabila keadilan distributif rendah maka kecenderungan kecurangan akuntansi akan tinggi.

b. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses kebijakan, prosedur, cara maupun peraturan yang ditetapkan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Gupta & Gupta (2015) menyatakan bahwa kelemahan pengendalian internal akan menjadi faktor utama terbukanya kesempatan adanya kecurangan. Pengendalian internal yang lemah akan membuka peluang tindak kecurangan sedangkan, pengendalian internal yang kuat akan meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan.

2.1.2. Teori Perkembangan Moral

Tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya seperti yang diungkapkan (Kohlberg 1969 dalam Kohlberg & Hersh, 2013). Teori ini berpandangan bahwa penalaran moral, yang merupakan dasar dari perilaku etis, mempunyai enam perkembangan yang dapat teridentifikasi. Ia mengikuti perkembangan dari keputusan moral seiring penambahan usia yang semula diteliti Piaget (1958), yang menyatakan bahwa logika dan moralitas berkembang melalui tahapan-tahapan konstruktif. Kohlberg (1969) memperluas pandangan dasar ini dengan menentukan bahwa proses perkembangan moral pada prinsipnya

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

berhubungan dengan keadilan dan perkembangannya berlanjut selama kehidupan, ia menggunakan cerita-cerita tentang dilema moral dalam penelitiannya dan ia tertarik pada bagaimana orang-orang akan menjustifikasi tindakan-tindakan mereka bila mereka berada dalam persoalan moral yang sama, kemudian mengkategorisasi dan mengklasifikasi respon yang dimunculkan ke dalam enam tahap yang berbeda. Keenam tahap tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu pra konvensional, konvensional, dan pasca konvensional.

Enam tahapan perkembangan moral menurut Kohlberg (1976):

a. Tingkat Pra Konvensional

Pada tingkat ini, individu akan bertindak sesuai aturan budaya, label baik dan buruk, serta pernyataan benar atau salah. Individu menafsirkan bahwa terdapat konsekuensi baik berupa hukuman, hadiah, maupun pertukaran nikmat pada saat mereka melakukan atau tidak melakukan tindakan sesuai aturan atau label yang berlaku. Dua tahapan tersebut yaitu:

1) Orientasi hukuman dan ketaatan

   Konsekuensi fisik yang dicerminkan dari kebaikan atau keburukan yang sudah individu lakukan.

2) Orientasi minat pribadi

   Pemenuhan kebutuhan pribadi, melihat unsur keadilan dan timbal balik. Melihat dari segi apakah untungnya buat saya.

b. Tingkat Konvensional

Individu akan bertindak berdasarkan persetujuan keluarga dan teman-teman serta pada norma yang ada di masyarakat. Kurang adanya konsekuensi langsung

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

yang jelas. Sikap individu bukan hanya bentuk konformitas harapan pribadi maupun tatanan sosial tetapi, juga merupakan kesetiaan untuk aktif mempertahankan, memberi dukungan, dan mengidentifikasi orang yang terlibat dalam suatu kelompok. Dua tahap berikut:

1) Orientasi keserasian interpersonal dan konformitas (Sikap anak baik)

   Menurut kelompok, perilaku baik adalah perilaku yang menyenangkan dan suka membantu orang lain. Perilaku sering dinilai berdasarkan niatnya, apabila individu berniat baik maka, seseorang akan menilai individu tersebut menjadi baik.

2) Orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial (Moralitas hukum dan aturan)

   Ada orientasi yang mengarah kepada otoritas, memperbaiki aturan, dan memelihara tatanan sosial. Perilaku yang benar terdiri dari menyelesaikan pekerjaan individunya, menghormati otoritas, dan memelihara tatanan sosial yang sudah membantu menyelesaikan kepentingan individu.

c. Tingkat Pasca Konvensional

Pada tingkatan ini terdapat upaya yang jelas untuk mendefinisikan nilai moral dan prinsip-prinsip yang memiliki validitas yang terpisah dari kelompok. Hal tersebut diartinya sebagai ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang. Tingkatan ini juga memiliki dua tahapan:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1) Orientasi kontrak sosial

Legalistik orientasi, tindakan yang benar cenderung didefinisikan dalam istilah hak dan standar individu secara umum yang telah diperiksa dan disetujui secara kritis oleh seluruh masyarakat.

2) Prinsip etika universal (*Principled conscience*)

Hak ditentukan oleh keputusan hati nurani sesuai dengan etika yang dipilih sendiri berdasarkan prinsip yang menarik bagi kelengkapan logis, universalitas, dan konsistensi. Prinsip-prinsip ini bersifat abstrak dan etis, mereka tidak konkret. Prinsip keadilan universal meliputi timbal balik dan kesetaraan hak manusia serta menghormati martabat manusia sebagai makhluk individu.

Teori perkembangan moral memunculkan variabel ketaatan aturan akuntansi dengan penjelasan bahwa manajemen merupakan kumpulan individu yang memiliki tahapan moral. Pada tahap konvensional, pertimbangan moral didasarkan atas pemahaman aturan sosial, hukun, dan kewajiban. Manajemen pada tahap konvensional mulai membentuk moralitas manajemennya dengan membuat dan memelihara aturan yang dalam penelitian ini adalah aturan akuntansi yang dilanjutkan hingga tahap kematangan moral manajemen yang tinggi yaitu tahap pasca konvensional.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Manajemen pada tahapan pasca-konvensional menunjukkan kematangan moral manajemen yang tinggi. Kematangan moral menjadi dasar dan pertimbangan manajemen dalam merancang tanggapan dan sikap terhadap isu-isu etis. Perkembangan pengetahuan moral menjadi indikasi pembuatan keputusan

yang secara etis serta positif berkaitan dengan perilaku pertanggung-jawaban sosial (Rahmi & Sovia, 2017).

Ketaatan aturan akuntansi merupakan kepatuhan terhadap standar dan prosedur penyusunan laporan keuangan. Jika aturan akuntansi atau pengelolaan keuangan pada instansi sektor publik tidak dilaksanakan dengan baik maka akan memberikan kesempatan terjadinya tindak kecurangan. Semakin tinggi tingkat ketaatan sektor publik terhadap aturan akuntansi maka, semakin rendah tindak kecurangan yang akan terjadi sedangkan semakin rendah tingkat terhadap ketaatan aturan akuntansi maka, semakin tinggi kecurangan akuntansi

2.2. Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Kecurangan *(fraud)* menurut Black Low Dictionary dalam Tungga (2010) adalah kesengajaan atau salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara sengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan. *Fraud* adalah tindakan melawan hukum, penipuan berencana, dan bermakna ketidakjujuran. Menurut Rezaee (2005) *fraud* dapat terdiri dari berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana kerah putih (*white collar crime*), antara lain pencurian, penggelapan aset penggelapan informasi penggelapan kewajiban, penghilangan atau penyembunyian fakta, dan rekayasa fakta termasuk korupsi.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai: (1) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan; (2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) di Indonesia. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva entitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggelapan tanda terima barang/uang, pencurian aktiva, atau tindakan yang menyebabkan entitas membayar barang atau jasa yang tidak diterima oleh entitas. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva dapat disertai dengan catatan atau dokumen palsu atau yang menyesatkan dan dapat menyangkut satu atau lebih individu di antara pegawai atau pihak ketiga.

Kecurangan adalah masalah yang sering terjadi dalam penyajian laporan keuangan. Kecurangan pada penyajian laporan keuangan terjadi mengingat laporan keuangan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan untuk pemangku kepentingan (pemimpin perusahaan, pemegang saham, dan pemerintah). Itu kerentanan penyajian laporan keuangan yang dimanipulasi oleh manajemen menimbulkan kekhawatiran bagi para pemangku kepentingan (Adnan & Kiswanto, 2017). Kecurangan akuntansi adalah istilah yang bersifat umum, dimana kecerdasan manusia dipaksakan yang dilakukan oleh satu individu untuk dapat menciptakan cara agar mendapatkan manfaat dari pihak lain dari representasi yang salah (Albrecht, 2012:6 dalam Muhammad & Ridwan, 2017).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Menurut Tungga (2010) pelaku kecurangan diklasifikasikan ke dalam dua kelompok yaitu manajemen dan karyawan atau pegawai. Pihak manajemen melakukan kecurangan biasanya untuk kepentingan perusahaan dan karyawan melakukan kecurangan untuk keuntungan individu. Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya kecurangan menurut teori *fraud triangle* yaitu:

a. Faktor tekanan *(perceived pressure)*, yaitu adanya insentif, tekanan dan kebutuhan untuk melakukan *fraud*. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain.

b. Faktor kesempatan atau peluang *(perceived opportunity)*, yaitu situasi yang membuka kesempatan untuk memungkinkan suatu kecurangan terjadi seperti bekerja tidak ada prosedur yang cukup, tidak mampu menilai kualitas kerja, kurang atau tidak adanya akses terhadap informasi, dan gagal dalam mendisiplinkan atau memberikan sanksi pelaku kecurangan.

c. Faktor alasan pembenaran *(rationalization)*, yaitu adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakuka kecurangan, atau orang-orang yang berada pada keadaan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan *fraud*.

Dikutip oleh Tunggal (2013) pada dasarnya ada dua tipe kecurangan yang terjadi di suatu instansi ataupun perusahaan, yaitu eksternal dan internal. Kecurangan eksternal yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap perusahaan dan kecurangan internal adalah tindakan tidak legal dari karyawan, manajer dan eksekutif terhadap perusahaan. Kecurangan adalah masalah yang sering terjadi dalam penyajian laporan keuangan. Kecurangan pada penyajian

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

laporan keuangan terjadi mengingat laporan keuangan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan untuk pemangku kepentingan (pemimpin perusahaan, pemegang saham, dan pemerintah). Kerentanan penyajian laporan keuangan yang dimanipulasi oleh manajemen menimbulkan kekhawatiran bagi para pemangku kepentingan (Adnan & Kiswanto, 2017).

Menurut Pristiyanti (2012) *Fraud* yang paling sering terjadi di sektor pemerintahan adalah korupsi. Korupsi berasal dari bahasa latin, *Corruptio-Corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Secara harfiah korupsi adalah perilaku pejabat publik, politisi maupun pegawai negeri yang memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain yang dekat dengannya secara tidak wajar, tidak legal, dan dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Wilopo (2006:24) menyebutkan beberapa indikator pengukuran kecenderungan kecurangan akuntansi yaitu :

a. Kecenderungan untuk melakukan manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya.

Manajemen cenderung akan melakukan kecurangan akuntansi yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti memanipulasi bukti-bukti transaksi biasanya dengan mengubah besarnya jumlah yang sebenarnya atau mengabaikan aturan akuntansi yang berlaku dalam proses penyusunannya, memalsukan dokumen-dokumen pendukung, dan mengubah pencatatan jurnal akuntansi terutama dilakukan pada saat mendekati akhir periode. Hal-hal tersebut dilakukan manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan laba perusahaan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

b. Kecenderungan untuk melakukan penyajian yang salah atau penghilangan peristiwa, transaksi, atau informasi yang signifikan dari laporan keuangan.

Manajemen secara sengaja melakukan salah saji dengan menghilangkan atau mengabaikan suatu peristiwa, transaksi atau informasi yang signifikan dalam laporan keuangan yang dapat memperdayai pengguna laporan keuangan. Tindakan ini dilakukan manajemen untuk memenuhi tujuan laba.

c. Kecenderungan untuk melakukan salah menerapkan prinsip akuntansi secara sengaja.

Untuk memaksimalkan laba manajemen dapat berbuat curang dengan sengaja menerapkan prinsip akuntansi yang salah seperti mengubah asumsi yang terkait dengan pencatatan jumlah, klasifikasi dan pelaporan pada transaksi keuangan.

d. Kecenderungan untuk melakukan penyajian laporan keuangan yang salah akibat pencurian (penyalahgunaan atau penggelapan) terhadap aktiva yang membuat entitas membayar barang atau jasa yang tidak terima.

Manajemen dapat melakukan salah saji yang berasal dari penyalahgunaan atau penggelapan aktiva dengan melakukan rekayasa dalam laporan keuangan untuk menutupi pencurian aktiva tersebut dan menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

e. Kecenderungan untuk melakukan penyajian laporan keuangan yang salah akibat perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva dan disertai dengan catatan atau dokumen palsu dan dapat menyangkut satu atau lebih individu.

Adanya perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva dan disertai dengan catatan atau dokumen palsu mengakibatkan pihak instansi akan berusaha menutupi masalah tersebut dengan melakukan tindakan kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan. Tindakan kecurangan tersebut dapat menyangkut satu atau lebih individu baik manajemen, karyawan, atau pihak ketiga. Akibat dari tindakan kecurangan tersebut laporan keuangan yang disajikanpun akan salah dan tidak sesuai dengan standar yang berlaku.

2.3. Perilaku Tidak Etis

Etika merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah atau tindakan yang baik dan yang buruk yang mempengaruhi hal lainnya Griffin & Ebert (2006) Nilai-nilai dan moral pribadi perorangan dan konteks sosial yang menentukan apakah suatu perilaku tertentu dianggap sebagai perilaku etis dan perilaku tidak etis. Etika mempengaruhi perilaku pribadi di lingkungan kerja. Tanggung jawab sosial adalah sebuah konsep yang berhubungan, namun merujuk pada seluruh cara bisnis berupaya menyeimbangkan komitmennya terhadap kelompok dan pribadi dalam lingkungan sosialnya. Buckley *et al.,* (1998) dalam Fauwzi (2012), menjelaskan bahwa perilaku tidak etis merupakan suatu yang sulit untuk dimengerti, jawabannya tergantung pada interaksi yang kompleks antara situasi serta karakteristik pribadi pelakunya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Tang & Chiu (2003) menjelaskan indikator dari perilaku yang menyimpang atau tidak etis dalam instansi yaitu:

a. *Abuse position*

Perilaku yang menyalahgunakan kedudukan atau posisi. Tidak jarang manajemen memanfaatkan jabatan atau posisinya untuk melakukan hal yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, hal yang bertentangan tersebut seperti kecurangan dalam pelaporan keuangan seperti salah saji jumlah yang sengaja baik melebihsajikan laba atau merendahsajikan laba, pengaturan laba dan perataan laba dimana kecurangan tersebut dilakukan untuk menipu para pemakai laporan keuangan.

b. *Abuse power*

Perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan. Seorang pimpinan perusahaan atau manajemen puncak memiliki kekuasaan tertinggi di dalam sebuah perusahaan. Namun tidak jarang seorang pimpinan menyalahgunakan kekuasaannya untuk bertindak tidak etis seperti melakukan pencurian aset dimana hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dan hal tersebut sangat merugikan perusahaan.

c. *Abuse resource*

Perilaku yang menyalahgunakan sumberdaya organisasi. Pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan dalam suatu perusahaan mungkin saja bisa memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Pemanfaatan tersebut bisa berupa tindakan yang menyimpang seperti melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan maupun penyalahgunaan aset. Apabila kejadian ini

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

terus berlanjut perusahaan akan mengalami kerugian dimana perusahaan tidak bisa bertahan lama dalam persaingan bisnis sekarang dan mendatang.

d. *No Action*

Perilaku yang tidak berbuat apa-apa. Perilaku ini menjelasan bagaimana seorang pimpinan yang memiliki kewenangan penuh dalam suatu perusahaan tidak dapat berbuat apa-apa ketika mengetahui karyawan dalam perusahaanya melakukan suatu tindakan kecurangan maupun perilaku yang tidak wajar.

Menurut Arens dan Loebbecke (1997) dalam Arifiyani & Sukirno (2012) terdapat dua faktor utama yang mungkin menyebabkan orang berperilaku tidak etis, yaitu: (1) Standar etika seseorang berbeda dengan masyarakat pada umumnya perbedaan prinsip dan pendapat membuat seseorang berbeda dengan yang lainnya. Ketika sekelompok orang beranggapan melakukan kecurangan adalah hal yang tidak wajar, sekelompok lain beranggapan sebagai hal yang wajar dilakukan. Adanya standar etika yang berbeda membuat perilaku tidak etis merupakan hal sulit untuk dimengerti; (2) Seseorang sengaja berperilaku tidak etis untuk keuntungan diri sendiri. Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, memaksa seseorang berperilaku tidak etis tujuannya untuk memperoleh sesuatu yang lebih, yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi.

Perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Purnomo & Khafid, 2017). Perilaku tidak etis seharusnya tidak bisa diterima secara moral karena mengakibatkan bahaya bagi orang lain dan lingkungan. Untuk meminimalisasi dan mengantisipasi terjadinya perilaku tidak

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

etis, instansi atau perusahaan sebaiknya mendorong pegawai untuk menanamkan sikap dan berperilaku etis baik di dalam maupun di luar instansi atau perusahaan.

2.4. Ketaatan Aturan Akuntansi

Ketaatan merupakan sikap patuh atau setia terhadap perintah atau aturan, sedangkan aturan adalah kaidah atau petunjuk yang dibuat untuk mengatur sesuatu yang harus dijalankan. Menurut Rizky & Fitri (2017) wajib bagi suatu organisasi untuk memiliki dasar atau pedoman yang digunakan oleh manajemen dalam menentukan dan melaksanakan semua kegiatan perusahaan dan salah satunya aturan mengenai kegiatan akuntansi. Pada suatu instansi terdapat dasar atau pedoman yang digunakan manajemen dalam menentukan dan melaksanakan jalannya berbagai kegiatan di dalam perusahaan salah satunya adalah aturan mengenai kegiatan akuntansi (Shintadevi, 2015). Ketaatan aturan akuntansi merupakan kewajiban organisasi untuk mematuhi aturan dalam mengelola keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar informasi dalam laporan yang dihasilkan efektif, handal, dan akurat sehingga terhindar dari tindakan yang menyimpang dan dapat merugikan organisasi.

Aturan akuntansi yang berkualitas akan menjadi faktor penting dalam mewujudkan transparansi dalam bidang keuangan di sebuah instansi. Aturan akuntansi memuat kebijakan dan prosedur akuntansi yang harus diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam sebuah instansi. Ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian prosedur pengelolaan aset intansi, pelaksanaan prosedur akuntansi, dan penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya. suatu instansi pemerintahan akan melakukan tindakan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

kecurangan karena mereka tidak berpedoman pada aturan akuntansi yang berlaku (Novikasari, 2017). PP RI No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa aturan yang digunakan dalam kegiatan akuntansi adalah standar akuntansi keuangan sedangkan kepatuhan terhadap aturan akuntansi dilihat sebagai tingkat kesesuaian dari aset organisasi prosedur manajemen, pelaksanaan prosedur akuntansi dan penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukung, yang ditentukan oleh BPK dan atau SAP.

Thoyibatun (2019) menyebutkan beberapa indikator pengukuran ketaatan aturan akuntansi adalah :

a. Persyaratan pengungkapan

Persyaratan pengungkapan menjelaskan bahwa setiap entitas akuntansi di lingkungan pemerintah diharapkan menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan keuangan terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan laporan kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD (PP RI nomor 24, 2005 tentang SAP).

b. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan publik

Melalui laporan keuangan dan laporan kinerja, suatu entitas menyajikan laporan yang bermanfaat bagi publik, dengan begitu pimpinan dapat menunjukkan pertanggungjawaban atas tugas-tugasnya dan menempatkan kepentingan pemakai pada skala prioritas.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

c. Objektif

Prinsip objektif mengharuskan pembuat laporan keuangan dan laporan kinerja untuk bersikap jujur secara intelektual yang berarti bahwa informasi dalam laporan tersebut harus menggambarkan dengan jujur seluruh transaksi atau peristiwa lainnya yang terjadi yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan, bersikap adil atau tidak memihak satu pihak tertentu yang berarti informasi dalam laporan keuangan dan laporan kinerja harus diarahkan kepada kebutuhan para pemakainya dan tidak bergantung pada kebutuhan atau keinginan satu pihak tertentu, tidak berprasangka atau bias dan bebas dari konflik kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain yang berarti bahwa laporan keuangan dan laporan kinerja tersebut tidak boleh menguntungkan satu pihak tertentu karena adanya konflik kepentingan di mana satu pihak memiliki kepentingan yang berlawanan atau berbeda.

d. Memenuhi syarat kehati-hatian

Pembuat laporan keuangan harus memiliki tanggung jawab dengan kompetensi, ketekunan dan kehati-hatian. Kehati-hatian tersebut berarti bahwa pembuat laporan keuangan dan laporan kinerja harus mempunyai kewajiban untuk bersikap hati-hati dalam menjalankan tugasnya agar hasil dari laporan-laporan tersebut dapat memberikan informasi yang mudah dipahami, handal, dan relevan bagi penggunanya

e. Memenuhi konsep konsistensi penyajian

Konsep konsisten penyajian menjelaskan bahwa penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan dan laporan kinerja antar periode konsisten

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

sesuai SAP (PP RI nomor 24, 2005). Namun, demikian perubahan penyajian dapat dilaksanakan jika perubahan tersebut memberikan informasi yang handal dan lebih relevan bagi pengguna atau struktur yang baru mempunyai kecenderungan akan dipergunakan seterusnya

Suatu instansi atau lembaga akan melakukan tindakan kecurangan karena mereka tidak berpedoman pada aturan akuntansi yang berlaku (Bartenputa, 2016). Albrecht & Albrecht (2003) menyatakan bahwa perilaku menyimpang dari aturan berpengaruh terhadap kebijakan dan tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau mengarah pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Wolk and Tearney (1997:93-95) dalam Wilopo (2006) menjelaskan bahwa kegagalan dalam menyusun laporan keuangan karena ketidaktaatan manajemen terhadap aturan akuntansi di mana hal tersebut menimbulkan kecurangan akuntansi. ketaatan aturan akuntansi diharapkan dapat meminimalisir dan mencegah perilaku tidak etis yang merujuk pada tindakan kecurangan akuntansi.

2.5. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Efektivitas merupakan keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan dari suatu kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem menitikberatkan pada keberhasilan instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditargetkan (Shintadevi, 2015). Sebuah sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang agar manajemen mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan perusahaannya. Kebijakan dan prosedur tersebut sering kali disebut sebagai pengendalian, dan secara kolektif akan membentuk suatu pengendalian internal entitas (Fachrunisa,

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Hasan, & Safitri, 2015). Menurut Mahmudi (2011:252) dalam Tandaju & Elim (2015) tujuan dibangunnya sistem pengendalian internal adalah untuk:

a. Melindungi aset negara baik aset fisik maupun data.

b. Memelihara catatan dan dokumen secara rinci dan akurat.

c. Menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal.

d. Memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah).

e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi organisasi.

f. Menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendalian internal meliputi lima kategori yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan jaminan bahwa sasaran hasil pengendalian manajemen akan terpenuhi, komponen pengendalian internal menurut Arens (2008) adalah :

a. Lingkungan Pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap dari manajemen puncak, para direktur, dan pemilik dari suatu entitas mengenai pengendalian internal dan pentingnya komponen bagi entiats itu. Terdapat subkomponen dalam pengendalian internal untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian yaitu: (1) Integritas dan nilai-nilai etis; (2) Komitmen dan kompetensi; (3) Partisipan dewan komisaris dan komite audit; (4) Filosofi dan gaya operasi

manajemen; (5) Struktur organisasi; dan (6) kebijakan dan praktik sumber daya.

b. Penilaian Risiko adalah identifikasi manajemen dan analisis resiko yang relevan dengan persiapan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip berlaku umum. Setelah mengidentifikasi risiko, manajemen mengestimasi signifikansi risiko tersebut, lalu menilai kemungkinana terjadinya risiko, dan mengembangkan tindakan khusus yang diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut hingga ke tingkat yang dapat diterima.

c. Aktivitas Pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Dibagi menjadi lima jenis yaitu: (1) Pemisahan tugas yang memadai; (2) Otoritas yang sesuai atas transaksi dan aktivitas; (3) Dokumen dan catatan yang memadai; (4) Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan; dan (5) Pemeriksaan kinerja secara independen.

d. Informasi dan Komunikasi, sistem informasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi. terdapat subkomponen yang terdiri atas kelas transaksi seperti penjualan, penerimaan kas, akuisisi, dan lain-lain.

e. Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian intern sepanjang waktu. Agar proses pemantau berjalan efektif maka fungsi audit internal harus dilakukan oleh staf yang independen dari bagian operasi maupun bagian akuntansi serta mereka melapor langsung ke tingkat otoritas

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

yang lebih tinggi dalam organisasi baik manajemen atau komite audit atau dewan direksi.

Menurut PP No. 8 Tahun 2006 dalam Adelin (2013) pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efesiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan. Tahun 2008 dikeluarkan sebuah PP No. 60 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan menyatu menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah juga memiliki lima komponen, yaitu

a. Lingkungan pengendalian;
b. Penilaian risiko;
c. Kegiatan pengendalian;
d. Informasi dan komunikasi; dan
e. Pemantauan.

Perusahaan dengan pengendalian internal yang lemah akan memiliki banyak celah yang menjadikan kesempatan bagi manajemen atau karyawan untuk memanipulasi transaksi(Indriani, 2016). Adanya pengendalian internal yang efektif diharapkan dapat meminimalisasi perilaku tidak etis yang dapat menimbulkan kecurangan akuntansi pada instansi atau perusahaan. Terdapat pengaruh lingkungan yang ditata terhadap suatu usaha untuk meminimalasir perilaku tidak etis di dalam suatu manajemen (Beu and Buckley, 2001). Sistem pengendalian internal memegang peran penting dalam organisasi untuk

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

meminimalisir terjadinya kecurangan. Pengendalian internal yang efektif akan menutup peluang terjadinya kecenderungan untuk berlaku curang dalam akuntansi (Mustika, 2016).

2.6. Keadilan Distributif

Secara konseptual keadilan distributif berkaitan dengan distribusi keadaan dan barang yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan individu. Kesejahteraan yang dimaksud meliputi aspek-aspek fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial. Tujuan distribusi ini adalah kesejahteraan sehingga yang didistribusikan biasanya berhubungan dengan sumber daya, ganjaran atau keuntungan (Deutsch, 1998). Supardi (2008) dalam Najahningrum(2013) keadilan distributif merupakan sebuah persepsi tentang nilai-nilai yang diterima oleh pegawai berdasarkan penerimaan suatu keadaan atau barang yang mampu mempengaruhi individu. Keadilan distributif pada dasarnya dapat tercapai bila penerimaan atau masukan antara dua orang sebanding. Jikalau dari perbandingan proporsi yang diterima dirinya lebih besar, maka ada kemungkinan bahwa hal itu lebih ditoleransi atau tidak dikatakan tidak adil, dibanding bila proporsi yang diterimanya lebih rendah dari yang semestinya. Didukung oleh pernyataan Yulianti et al. (2016) bahwa keadilan distributif didefinisikan sebagai persepsi karyawan tentang keadilan pendistribusian sumberdaya organisasi yang mengevaluasi distribusi hasil-hasil organisasi, dengan memperhatikan beberapa aturan distributif, yang paling sering digunakan adalah hak menurut keadilan dan kewajaran.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Menurut Faturochman (2002) dalam Najahningrum (2013), keadilan distributif terbagi menjadi 3 tingkatan yaitu nilai, perumusan nilai-nilai menjadi peraturan, dan implementasi peraturan. Tingkat pertama keadilan distributif terletak pada nilai. Pada tingkat nilai keadilan hanya berlaku sesuai dengan nilai yang dianut. Nilai-nilai keadilan berubah sesuai dengan tujuan dan kondisi yang ada. Prinsip ini tidak cocok untuk meningkatkan prestasi atau dalam suatu kompetisi. Tingkatan kedua keadilan distributif terletak pada perumusan nilai-nilai menjadi peraturan. Misalnya, untuk mendistribusikan upah buruh, prinsip yang dianutnya adalah besarnya usaha agar distribusinya adil, usaha harus dijelaskan indikatornya. Keadilan pada tingkat ini dapat tercapai bila pihak-pihak di dalamnya sepakat dengan aturan yang jelas itu. Tingkatan ketiga keadilan distributif terletak pada implementasi peraturan. Guna menilai distribusi adil atau tidak, dapat dilihat dari tegaknya peraturan yang diterapkan. Ketidakadilan distributif juga tidak dapat dicapai bila peraturan tidak diterapkan secara konsisten baik antar waktu maupun antar individu.

2.7. Kajian Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi telah dilakukan. Rae & Subramaniam (2008) melakukan penelitian pada 64 perusahaan di Australia dianalisis menggunakan regresi logistik dan regresi berganda untuk menguji pengaruh interaksi antara persepsi keadilan organisasional dan kualitas pengendalian internal terhadap kecurangan karyawan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika lingkungan perusahaan, pelatihan manajemen risiko, dan tingkat aktifitas

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

audit internal berpengaruh terhadap kualitas pengendalian internal. Kualitas pengendalian internal memoderasi pengaruh persepsi keadilan organisasional terhadap kecenderungan kecurangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rae & Subramaniam (2008) adalah sama-sama menguji pengaruh persepsi mengenai keadilan organisasional diwakilkan dengan keadilan distributif dan sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rae & Subramaniam (2008) adalah jenis data yang digunakan, Rae & Subramaniam menggunakan data sekunder dalam penelitiannya, sementara penelitian ini menggunakan data primer.

Lou & Wang (2009) melakukan penelitian untuk menguji faktor yang berpengaruh terhadap kemungkinan kecurangan. Variabel yang digunakan merupakan proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* berdasarkan teori *fraud triangle* yaitu tekanan atau *pressure*, peluang atau *opportunity, dan rationalization.* Tekanan diproksikan dengan tekanan keuangan dari perusahaan dan tekanan keuangan dari direktur atau supervisor dari perusahaan. Peluang diproksikan dengan jumlah transaksi yang kompleks dalam perusahaan dan pengendalian internal perusahaan. *Rationalization* diproksikan dengan integritas manajemen dan hubungan dengan auditor.Penelitian tersebut juga menggunakan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan keuangan yang ditanggung perusahaan, tekanan keuangan yang ditanggung direktur atau supervisor, jumlah transaksi yang kompleks, integritas manajemen, dan hubungan dengan auditor eksternal berkorelasi positif dengan kemungkinan terjadinya kecurangan. Sementara ukuran perusahaan berkorelasi

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

negatif dengan kemungkinan terjadinya kecurangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Lou & Wang (2009) adalah memproksikan variabel berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* berdasarkan teori *fraud triangle* seperti ketaatan aturan akuntansi, sistem pengendalian internal, keadilan distributif, dan perilaku tidak etis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Lou & Wang (2009) adalah dalam penelitian Lou menggunakan data sekunder pada perusahaan swasta yang terdaftar dalam Taiwan *Stock Exchange* (TSE) and Taiwan *over-the-counter market* (OTC) sementara, penelitian ini dilakukan pada entitas pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan Najahningrum (2013) menunjukkan bahwa penegakan peraturan, sistem pengendalian internal, keadilan distributif, keadilan prosedural, komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan. Variabel terakhir yaitu budaya etis organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Najahningrum (2013) adalah menguji faktor-faktor yang memengaruhi kecurangan akuntansi seperti sistem pengendalian internal dan keadilan distributif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Najahningrum (2013) adalah variabel *intervening*. Penelitian Najahningrum tidak terdapat variabel *intervening* sedangkan penelitian ini menggunakan variabel *intervening* berupa variabel perilaku tidak etis.

Penelitian yang dilakukan Siregar & Tenoyo (2015) menunjukkan rendahnya pengendalian internal dan nilai etika menyebabkan entitas terancam

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

terkena kecurangan. Entitas harus memiliki sistem pelaporan tindak kecurangan, korupsi, maupun kesalah. Selain itu juga memiliki audit internal dan pengendalian internal yang baik agar terhindar dari kecurangan. Industri keuangan dianggap memiliki risiko penipuan tertinggi. Persamaaan penelitian ini dengan penelitian Siregar & Tenoyo (2015) adalah menggunakan sistem pengendalian internal untuk menguji ada tidaknya kecurangan akuntansi. Perbedaan penelitian ini dan penelitian Siregar dan Tenoyo adalah objek penelitian. Penelitian tersebut menggunakan sampel perusahaan swasta di Indonesia yang sedang berkembang sedangkan, penelitian ini menggunakan instansi pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan Wulandari & Suryandari (2016) menunjukkan bahwa sistem internal, asimetri informasi, moralitas individu berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Keadilan distributif, keadilan prosedural, kultur organisasi, penegakan hukun tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi.Persamaan penelitian ini dengan penelitian Wulandari & Suryandari (2016) adalah menguji faktor-faktor yang memengaruhi kecurangan akuntansi seperti sistem internal dan keadilan distributif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Wulandari & Suryandari (2016) adalah variabel *intervening*dan alat analisis data. Penelitian tersebut tidak terdapat variabel *intervening* sedangkan penelitian ini menggunakan variabel *intervening* berupa variabel perilaku tidak etis. Penelitian tersebut menggunakan alat analisis berupa SPSS 21 sementara, penelitian ini menggunakan alat analisis *smart*PLS 3.0

Widiutami, Sulindawati, & Atmadja (2017) melakukan penelitian dengan hasil efektivitas pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, komitmen

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di Kabupaten Buleleng. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Widiutami, Sulindawati, & Atmadja (2017) adalah menggunakan variabel pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Widiutami, Sulindawati, & Atmadja terletak pada alat analisis. Penelitian tersebut menggunakan alat analisis berupa SPSS sementara, penelitian ini menggunakan alat analisis *smart*PLS 3.0. Perbedaan lain juga ditemukan pada objek penelitian, penelitian tersebut menggunakan sampel pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sementara penelitian ini mengambil sampel pada Dinas dan Badan Kota Semarang.

Purnomo & Khafid (2017) menunjukkan hasil bahwa efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan kepatuhan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Efektivitas pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi memiliki dampak terhadap kecurangan sedangkan kepatuhan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecurangan. Pengaruh mediasi perilaku tidak etis antara pengendalian internal dan kepatuhan aturan akuntansi tidak mempunyai hubungan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sementara, pengaruh mediasi perilaku tidak etis antara kesesuaian kompensasi mempunyai hubungan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Purnomo & Khafid (2017) adalah sama-sama menggunakan perilaku tidak etis sebagai variabel *intervening* dan *smartPLS* sebagai alat analisis data serta menggunakan Teori Pengembangan Moral. Yang membedakan yaitu responden penelitian ini adalah pegawai

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

subbagian keuangan Dinas dan Badan Kota Semarang sementara, penelitian Purnomo & Khafid (2017) adalah pegawai Dinas Kabupaten Kendal.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud).*Peneliti sebelumnya juga menyarankan untuk meneliti faktor lain yang merupakan proksi dari fraud triangle, sehingga peneliti bermaksud untuk menambah variabel baru berupa keadilan distributif yang merupakan proksi dari tekanan.

Tabel 2.1. Review penelitian sebelumnya

		Alat Analisis	**Hasil Penelitian**
Kirsty Rae and Nava Subramaniam (2008)	*Incidence of Employee fraud, ICP Quality, Organizational Justice Perceptons, Corporate ethical Environment Risk Management Training, Internal Audit Activities*	*Logistic regression and OLS multipple regression*	*ICP Quality* memiliki efek moderat antara *organizational justice perseptions* terhadap *employee fraud. ICP Quality* secara positif signifikan dipengaruhi oleh *corporate Etichal Environment Risk management Training, Internal Audit Activities*
Young –I Lou dan Ming-Long Wang (2009)	*Fraudulent financial Reporting firm's financial pressure, director's and supervisor's financial pressure, complicated transaction, internal control environment, manager's integrity, manager's and auditor's relationship, Firm size*	*Nonparam etric test, logistic regression*	*Fraudulent financial reporting* berkorelasi positif dengan tekanan keuangan dari sebuah peruaahaan atau dari supervisor dari perusahaan, jumlah transaksi perusahaan yang kompleks, integritas manajemen, dan hubungan yang tidak baik antara perushaan dengan auditor. Ukuran perusahaan berkorelasi negatif dengan *Fraudulent Financial Report*

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

		Alat Analisis	Hasil Penelitian
Anik Fatun Najahningrum (2013)	Pengaruh penegakan peraturan, sistem pengendalian internal, asimetri informasi,keadilandistributif, keadilan prosedural, komitmen organisasi, budaya etis organisasi, dan kecurangan.	*Structural Equation Modeling (SEM)* dengan alat analisis *smartPLS*	Pengaruh negatif antara penegakan peraturan, sistem pengendalianinternal, keadilan distributif, keadilan prosedural, dan komitmen organisasi dengan kecurangan*(fraud)* di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh positif antara asimetri informasi dengankecurangan *(fraud)* di sektor pemerintahan, tidak terdapat pengaruh antara budaya etis organisasidengan kecurangan *(fraud)* di sektor pemerintahan
Sylvia Veronica Siregar dan Bayu Tenoyo (2015)	Kesadaran penipuan, pencegahan penipuan, deteksi penipuan	Kualitatif, deskriptif	Rendahnya pengendalian internal dan nilai etika menyebabkan entitas terancam terkena kecurangan. Entitas harus memiliki sistem pelaporan tindak kecurangan, korupsi, maupun kesalah. Selain itu juga memiliki audit internal dan pengendalian internal yang baik agar terhindar dari kecurangan.
Retno Wulandari, Dhini Suryandari 2016	Sistem pengendalian internal, asimetri informasi, keadilan distributif, keadilan prosedural, kultur organisasi, penegakan hukum, moralitas individu, dan *fraud*.	Regresi berganda dangan alat analisis SPSS	Pengaruh negatif antara sistem pengendalian internal dan moralitas individu terhadap *fraud*. Pengaruh positif asimetri informasi terhadap *fraud*. Tidak terdapat pengaruh keadilan distributif, keadilan prosedural, kultur organisasi, dan penegakan hukum terhadap *fraud*.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

		Alat Analisis	Hasil Penelitian
Ni Putu Sri Widiutami, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Anantawikrama Tungga Atmadja 2017	Efektivitas pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, komitmen organisasi, kecenderungan kecurangan akuntansi	Regresi berganda dangan alat analisis SPSS	Efektivitas pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di Kabupaten Buleleng
Yanuar Dwi Purnomo dan Muhammad Khafid (2017)	Efektivitas pengendalian internal, kesesuaian Kompensasi, kepatuhan terhadap aturan akuntansi, perilaku tidak etis, dan Kecurangan Akuntansi	*Structural Equation Modeling (SEM)* dengan alat analisis *smartPLS*	Efektivitas pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi memiliki dampak terhadap kecurangan sedangkan kepatuhan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecurangan. Pengaruh mediasi perilaku tidak etis antara pengendalian internal dan kepatuhan aturan akuntansi tidak mempunyai hubungan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sementara, pengaruh mediasi perilaku tidak etis antara kesesuaian kompensasi mempunyai hubungan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Sumber: Berbagai penelitian yang diolah (2018)

2.8. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Perilaku Tidak Etis

Tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya seperti yang diungkapkan Kohlberg (1969). Tahap moralitas manajemen diawali dari menaati aturan yang sudah ada, membuat atau mengembangkan dan memelihara aturan

yang dalam penelitian ini adalah aturan akuntansi yang dilanjutkan hingga tahap kematangan moral manajemen yang tinggi yaitu tahap pasca konvensional. Penyajian laporan keuangan yang transparan oleh organisasi merupakan kewajiban sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang telah didelegasikan kepada pimpinan agar menghasilkan informasi yang efektif, andal, dan akurat. Menurut Shintadevi (2015) taatnya manajemen pada aturan akuntansi yang berlaku dalam melakukan kegiatan-kegiatan akuntansi diharapkan dapat mengurangi perilaku tidak etis. Sesuai dengan teori perkembangan moral, ketaatan manajemen terhadap aturan akuntansi yang berlaku diharapkan dapat mengurangi perilaku tidak etis.Semakin taat perusahaan terhadap aturan akuntansi yang berlaku semakin rendah pula tindakan tidak etis yang dilakukan manajemen dalam organisasi.

Berdasarkan penelitian Nurlaeliyah & Anisykurlillah (2017) di mana kepatuhan terhadap aturan akuntansi tidak berpengaruh pada perilaku tidak etis. Berbeda dengan hasil dari Thoyibatun (2009) ketaatan aturan akuntansi dapat mencegah dan mengurangi perilaku tidak etis manajemen dalam suatu instansi. Penelitian Shintadevi (2015) menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap perilaku tidak etis. Berdasarkan uraian diatas, maka hubungan antara ketaatan aturan akuntansi dengan perilaku tidak etis adalah sebagai berikut:

H1: Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku tidak etis.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.8.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Perilaku Tidak Etis

Fraud triangle theory menjelaskan bahwa kesempatan merupakan salah satu faktor perilaku tidak etis atau kecurangan. Peluang atau kesempatan yang dimiliki untuk melakukan kecurangan manajemen dipicu oleh faktor-faktor seperti lemahnya keberadaan dewan direksi atau adanya pengendalian internal yang tidak memadai dan kemampuan untuk menyembunyikan kecurangan di balik transaksi-transkasi yang kompleks atau melalui pola-pola transaksi dengan pihak-pihak terkait lainnya (Zimbelman *et al*, 2014:43). Pengendalian internal yang lemah dalam sebuah instansi akan membuka peluang seseorang unutk melakukan tindakan tidak etis karena beranggapan bahwa tindakan tidak etis tersebut tidak dapat terdeteksi oleh pengendalian internal yang ada. Artinya, sistem pengendalian yang baik akan mempengaruhi seberapa sering perilaku tidak etis terjadi.

Pengendalian internal memerlukan lingkungan pengendalian yang memadai agar dapat membentuk disiplin dan struktur di dalam instansi. Selain itu, pengendalian intern digunakan untuk memberikan perlindungan bagi instansi terhadap kelemahan manusia yang memungkinkan dapat mengurangi kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Artinya, di dalam sebuah instansi membutuhkan pengendalian internal yang efektif agar seluruh pegawai dapat bekerja dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku atau berperilaku etis. Pendapat Beu dan Buckley (2001) dalam (Thoyibatun, 2012) yang melaporkan adanya pengaruh lingkungan (sebagai salah satu komponen pengendalian internal)

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

yang ditata terhadap usaha untuk menekan munculnya perilaku tidak etis. Hasil penelitian Aprila et al. (2017) bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap perilaku tidak etis. Didukung pula dengan penelitian Nurlaeliyah & Anisykurlillah (2017) mempelajari, efektivitas pengendalian internal dapat mencegah dan mengurangi perilaku tidak etis. Berdasarkan kerangka berpikir maka, disusun hipotesis ketujuh sebagai berikut:

H2: Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku tidak etis

2.8.3. Pengaruh Keadilan Distributif Terhadap Perilaku Tidak Etis

Cressey (1953) menyimpulkan bahwa kecurangan secara umum mempunyai tiga sifat umum. *Fraud triangle* terdiri dari tiga kondisi yang umumnya hadir pada saat *fraud* terjadi yaitu *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*. Menurut (Adelin, 2013) Pegawai yang memiliki utang yang sangat besar atau mereka yang terlibat dalam masalah kecanduan narkotika dan perjudian, dapat mencuri untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Kasus lainnya,hal-hal yang terkait dengan tekanan antara lain, kebutuhan hidup yang mendesak, penghasilan kurang, tidak sesuainya gaji, keadilan organisatoris. Karena adanya tekanan tersebut perilaku tidak etis muncul karena karyawan merasa tidak puas dan kecewa dengan hasil yang di dapat dari perusahaan serta lemahnya pengawasan manajemen yang dapat membuka keleluasaan karyawan untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan (Adelin, 2013).

Sesuai dengan *Fraud triangle theory* yang menyatakan apabila pegawai merasa tidak ada keadilan dalam persepsi kesesuaian gaji atau kompensasi yang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

diterima, maka akan menjadi sebuah tekanan sehingga mendorong pegawai untuk berperilaku tidak etis. Penelitian Yulianti et al. (2016) menunjukkan hasil keadilan distributif berhubungan negatif terhadap terjadinya perilaku tidak etis. Berdasarkan uraian diatas, maka hubungan antara keadilan distributif dengan perilaku tidak etis adalah sebagai berikut:

H3: Keadilan distributif berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku tidak etis

2.8.4. Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud)*

Menurut Nordiawan (2006) dalam (Novikasari, 2017) sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, seharusnya organisasi sektor publik mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. Proses pertanggungjawaban haruslah dilakukan secara transparan dan bebas dari tindak kecurangan. Suatu instansi pemerintah akan melakukan tindakan kecurangan karena mereka tidak berpedoman pada aturan akuntansi yang berlaku. Begitu sebaliknya jika suatu instansi taat terhadap aturan akuntansi yang berlaku maka kecenderungan kecurangan akuntansi dapat berkurang (Novikasari, 2017).

Wolk and Tearney (1997:93-95) dalam Kususmastuti (2012) menjelaskan bahwa kegagalan penyusunan laporan keuangan yang disebabkan karena ketidaktaatan dapat dideteksi melalui pernyataan standar yang jelas. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dibuat selain sebagai upaya untuk penyeragaman laporan keuangan, juga bertujuan untuk memudahkan pemeriksaan. Sesuai dengan pernyataan Kohlberg (1996) melalui teori perkembangan moral, moralitas

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

manajemen yang tinggi juga didukung dalam kepatuhan padaaturan yang berlaku. Teori ini menjelaskan bahwa pada tahap pasca-konvensional, manajemen berorientasi padaperaturan yang berlaku, sehingga kepatuhan dengan aturan akuntansi dapat membentuk manajemen yang tinggimoralitas dan dapat mengurangi kecenderungan penipuan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen. Penelitian Arista et al., (2016) memberikan hasil ketaatan aturan akuntansi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sedangkan Yadnya et al.(2017) menunjukkan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hubungan antara ketaatan aturan akuntansi dengan kecenderungan kecurangan akuntansi adalah sebagai berikut:

H4: Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

2.8.5. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*)

Terjadinya kecurangan dalam akuntansi disebabkan adanya tiga kondisi yang biasa disebut dengan *fraud triangle* (segitiga kecurangan) yaitu, insentif atau tekanan, kesempatan, dan sikap atau rasionalisasi. Kesempatan dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang memberikan celah atau kesempatan seseorang untuk melakukan kecurangan, dalam hal ini sistem pengendalian internal menjadi kesempatan atau peluang terjadinya tindak kecurangan apabila tidak berjalan secara efektif. Penerapan pengendalian internal efektif yang didukung dengan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

regulasi yang memadai akan mencegah berbagai bentuk persoalan dan ketidakwajaran yang merugikan berbagai pihak yang berkepentingan.

Tujuan dari pengendalian internal adalah agar kegiatan operasional perusahaan berjalan secara efektif dan efisien sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai (Najahningrum, 2013). Suatu instansi harus memiliki sistem pengendalian internal yang efektif di mana setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan pegawai dalam instansi atau lembaga tersebut mendapatkan pengawasan yang ketat (Novikasari, 2017). Aktivitas pada instansi yang semakin mengacu pada sistem pengendalian intern pemerintah maka akan memperkecil kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian Hasmarini & Yuniawan (2008) menunjukkan hasil pengendalian internal secara parsial tidak mempengaruhi kecenderungan kecurangan sedangkan, penelitian Purnomo & Khafid (2017) menunjukkan pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Penelitian lain Indriastuti, Agusdin, & Animah (2016) pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Berdasarkan uraian diatas, maka hubungan antara sistem pengendalian internal pemerintah dengan kecenderungan kecurangan akuntansi adalah sebagai berikut:

H5: Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.8.6. Pengaruh Keadilan Distributif Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*)

Salah satu faktor yang menyebabkan kecurangan dalam *fraud triangle theory* yang dikembangkan oleh Cressey (1950) adalah berdasarkan tekanan.

Tekanan dapat berasal dari faktor finansial maupun faktor non finansial. Faktor finansial diproksikan dengan keadilan distributif yang mana apabila karyawan merasa adanya ketidakadilan didalam suatu organisasi maka akan mengakibatkan karyawan merasa tidak dihargai dan merasa lingkungan kerja yang kurang kondusif sehingga dapat menimbulkan kemarahan, kebencian dan pemberontakan serta protes terhadap organisasi tempat ia bekerja sehingga, karyawan akan melakukan tindak kecurangan.

Menurut Greenberg & Baron (2003) keadilan distributif adalah persepsi seseorang mengenai keadilan atas pendistribusian sumber-sumber diantara para karyawan atau dengan kata lain yaitu persepsi keadilan atas bagaimana imbalan didistribusikan diantara para karyawan (Najahningrum, 2013). Jika seseorang mempersepsikan bahwa terdapat ketidakadilan mengenai gaji atau kompensasi yang seharusnya didapatkan maka akan mendorong orang tersebut melakukan kecurangan. Tekanan dalam dirinya yang terjadi berkaitan dengan ketidakadilan yang dipersepsikan sehingga mendorong untuk melakukan tindakan-tindakan kecurangan. Penelitian Rahmi & Sovia (2017) menunjukkan bahwa keadilan distributif berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan akuntansi sedangkan, penelitian Najahningrum (2013) menunjukkan bahwa keadilan distributif berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

H6: Keadilan distributif berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.8.7. Pengaruh Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud)*

Perilaku tidak etis adalah suatu sikap atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang di dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu di mana tujuan tersebut berbeda dari tujuan utama yang telah disepakati sebelumnya. Dijk (2000:297-305) dalam Thoyibatun (2009:4) menjelaskan perilaku tidak etis adalah perilaku yang menyimpang dari tugas pokok atau tujuan utama yang telah disepakati. Teori perkembang moral Kohlberg (1969) menunjukkan bahwa moralitas berkembang menjadi tiga tahapan yaitu: prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Tahap akhir adalah tahap di mana perkembangan moral membentuk prinsip-prinsip etika manajemen. Prinsip tersebut menunjukkan sikap manajemen dalam menentukan keputusan yang baik atau buruk. Jika perilaku yang ditunjukkan manajemen cenderung tidak etis maka kecenderungan kecurangan akuntansi akan semakin tinggi (Rahmi & Sovia, 2017). Hasil penelitian Nurlaeliyah & Anisykurlillah (2017) menunjukkan bahwa perilaku tidak etis memiliki efek positif pada kecenderungan penipuan akuntansi. Hipotesis penelitian sebagai berikut:

H7: Perilaku tidak etis berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.8.8. Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud)* Melalui Perilaku Tidak Etis

Tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya seperti yang

diungkapkan Kohlberg (1969). Teori perkembangan moral berpandangan bahwa penalaran moral yang merupakan dasar dari perilaku tidak etis, mempunyai enam perkembangan yang teridentifikasi.

Menurut Purnomo & Khafid (2017) kepatuhan terhadap aturan akuntansi adalah kewajiban dalam organisasi untuk mematuhi semuaketentuan atau aturan akuntansi dalam menjalankan manajemen keuangan dan laporan keuangan persiapan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas manajemen keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan adalah informasi yang efektif, andal dan akurat. Roberts *et al*. (2002:23) dalam Kusumastuti (2012) berpendapat bahwa cara profesi diorganisir melalui kode etik dan ketaatan atas aturan akuntansi akan memberikan pengaruh serta mengendalikan perilaku manajemen perusahaan. Semakin perusahaan taat pada aturan akuntansi, semakin rendah perilaku tidak etis manajemen perusahaan. Penelitian Fitri & Nurazlina (2016) menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi memiliki hubungan yang positif dan tidak signifikan terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis sedangkan, penelitian Shintadevi (2015) menunjukkan hasil bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis. Berdasarkan uraian diatas, maka hubungan antara ketaatan aturan akuntansi dengan kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis adalah sebagai berikut:

H8: Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.8.9. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kecenderungan Kecurangan *(Fraud)* Melalui Perilaku Tidak Etis

Fraud triangle theory menjelaskan bahwa salah satu kondisi terjadinya tindak kecurangan karena adanya peluang. Seseorang yang melakukan tindak kecurangan beranggapan bahwa perilaku tidak etis yang selama ini mereka lakukantidak terdeteksi oleh pengendalian internal yang ada pada organisasi tempatnya bekerja.

Menurut Nurlaeliyah & Anisykurlillah (2017) pengendalian internal adalah sistem internal yang ada dalam suatu organisasi yang akan menekan perilaku tidak etis seseorang untuk melakukan tindak penipuan. Keberadaan pengendalian internal yang efektif diharapkan dapat meminimalkan perilaku tidak etis yang mengacu pada tindakan curang dari suatu organisasi yang tindakannya dapat membahayakan organisasi tersebut. Penelitian Bestari, Azlina, & Julita (2016) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis sedangkan, penelitian Nurlaeliyah & Anisykurlillah (2017) menunjukkan hasil bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hipotesis penelitian sebagai berikut:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

H9: Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis

2.8.10. Pengaruh Keadilan Distributif Terhadap Kecenderungan Kecurangan *(Fraud)* Melalui Perilaku Tidak Etis

Teori segitiga kecurangan mengatakan bahwa tekanan menyebabkan seseorang berbuat menyimpang. Ketidakadilan distributif dalam gaji dan kompensasi dapat memberikan tekanan atau mendorong seseorang untuk mengambil tindakan yang menyimpang atau tidak sesuai dari aturan yang berlaku demi kepuasannya tercapai seperti berbuat kecurangan. Kekecewaan karyawan dengan hasil atau kompensasi yang diperoleh di dalam suatu perusahaan atas apa yang telah mereka kerjakan memicu karyawan untuk berperilaku tidak etis yang merujuk pada tindakan kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi seperti penyuapan, konflik kepentingan, pemberian tanda terima kasih yang tidak sah, dan pemerasan secara ekonomi di mana hal tersebut dapat merugikan instansi atau lembaga itu sendiri. Menurut penelitian Yulianti et al. (2016) Keadilan distributif berhubungan negatif terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis. Hipotesis penelitian sebagai berikut:

H10: Keadilan distributif berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.9. Hipotesis Penelitian

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

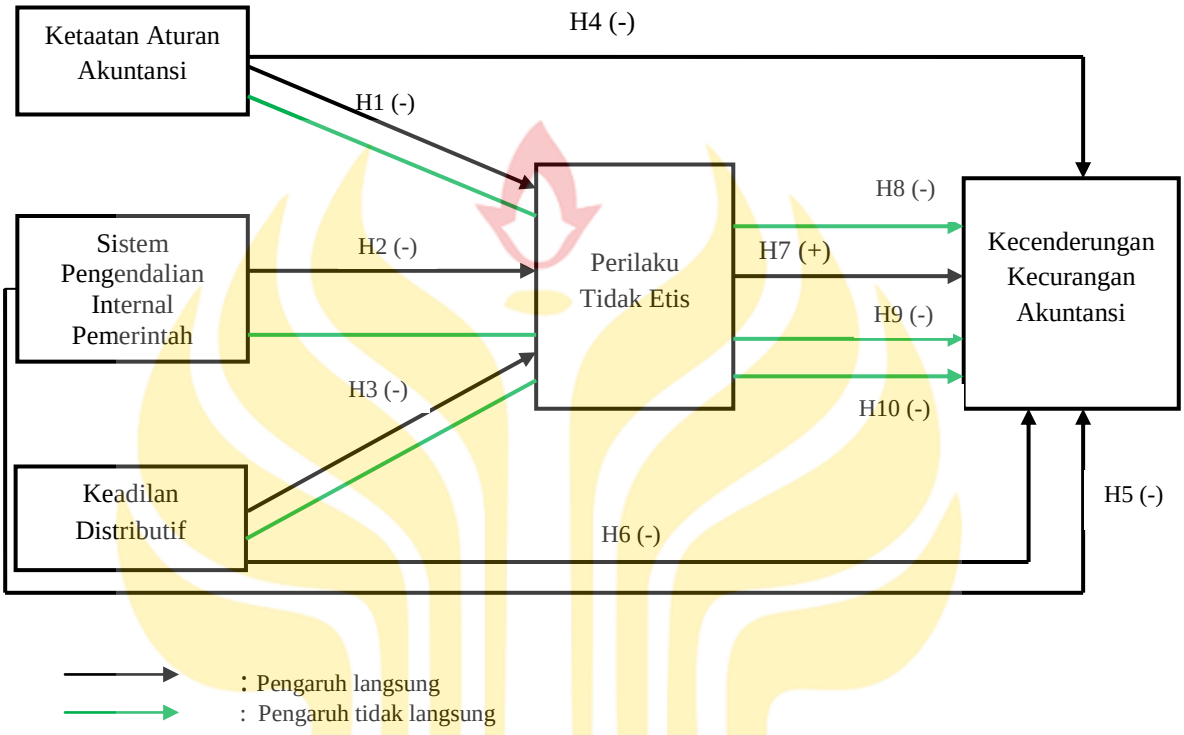

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, Penulis merumuskan sepuluh hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku tidak etis.

H2: Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku tidak etis

H3: Keadilan distributif berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku tidak etis

H4: Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

H5: Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

H6: Keadilan distributif berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

H7: Perilaku tidak etis berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

H8: Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis

H9: Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis

H10: Keadilan distributif berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ketaatan aturan akuntansi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan keadilan distributif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan perilaku tidak etis sebagai variabel yang memediasi pada ASN subbagian keuangan Dinas dan Badan Kota Semarang. Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka, peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh signifikan tehadap perilaku tidak etis. Tindakan tidak etis muncul dikarenakan pegawai kurang paham terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku tidak etis. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal pemerintah pada suatu instansi maka, semakin rendah kemungkinan terjadinya perilaku tidak etis dalam instansi tersebut.
3. Keadilan distributif berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku tidak etis. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keadilan distributif pada suatu instansi maka, semakin rendah kemungkinan terjadinya perilaku tidak etis dalam instansi tersebut.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4. Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan ketaatan aturan akuntansi dalam instansi maka, kecurangan akuntansi yang terjadi akan semakin rendah.
5. Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif tehadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sebenarnya sudah ada *Standard Operating Procedures* (SOP) pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas pada OPD Kota Semarang, hanya saja beberapa pegawai menganggap sistem pengendalian internal tersebut belum berjalan dengan efektif.
6. Keadilan distributif tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Adanya persepsi bahwa manusia tidak pernah merasa puas, memberikan asumsi bahwa adil atau tidaksuatu keadilan distributif yang berkaitan dengan besarnya gaji yang diterima pegawai di suatu instansi pemerintahan, pegawai akan tetap dapat melakukan tindakan kecurangan akuntansi.
7. Perilaku tidak etis berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah perilaku tidak etis diterapkan dalam instansi maka, kecurangan akuntansi yang terjadi akan semakin rendah pula.
8. Ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis dapat terjadi karena aturan akuntansi yang tidak ditaati. Hal ini dapat memicu tindak kecurangan akuntansi seperti suap, gratifikasi yang melanggar hukum, konflik

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

kepentingan, dan pemerasan ekonomi yang dapat merugikan organisasi lain maupun organisasi itu sendiri.

9. Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dalam instansi maka, kecurangan akuntansi yang terjadi akan semakin rendah walaupun dipengaruhi variabel lain yaitu perilaku tidak etis.
10. Keadilan distributif berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis. Hal ini menunjukkan bahwa semakin adil keadilan distributif dalam instansi maka, kecurangan akuntansi yang terjadi akan semakin rendah walaupun dipengaruhi variabel lain yaitu perilaku tidak etis.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Diharapkan pejabat yang berwenang atau atasan memberikan otorisasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bawahannya dansetiap pegawai lebih menaati peraturan yang berlaku agar dapat mencegah dan mengurangi kecurangan akuntansi yang mungkin dapat terjadi.
2. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diharapkan instansi pemerintah Kota Semarang untuk melakukan perputaran rotasi pegawai paling singkat

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2 tahun dan paling lama 5 tahun agar tidak terjadi larangan konflik kepentingan.

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan teori lain seperti *diamond theory* dengan variabel lain seperti kompetensi dan posisi dalam pekerjaan karena posisi seseorang dalam instansi dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan.
4. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pegawai subbagian, untuk penelitian selanjutnya mengambil sampel pejabat pemerintah atau dimulai dari eselon VI karena kemungkinan kecurangan terjadi lebih tinggi pada level tersebut dan mereka sebagai pengambil keputusan setiap bidang yang dikelolanya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

Ade, A. (2017). *Pengaruh Ketaatan Akuntansi,Moralitas Dan Motivasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar)*. Universitas Negeri Padang.

Adelin, V. (2013). *Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Bumn Di Kota Padang)*.

Adinda, Y. M., & Ikhsan, S. (2013). Accounting Analysis Journal. *Accounting Analysis Journal*, *1*(2), 1–6. Https://Doi.Org/Issn 2252-6765

Adnan, J., & Kiswanto. (2017). Determinant Of Auditor Ability To Detect Fraud With Professional Sceptisism As A Mediator Variable. *Accounting Analysis Journal*, *6*(3), 313–325. Https://Doi.Org/Issn 2252-6765

Ahrianti, D., Basuki, P., & Widiastuty, E. (2015). Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Asismetri Irnformasi, Perilaku Tidak Etis Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, *11*(1), 41–55. Https://Doi.Org/P-Issn: 0216-9517

Al-Saggaf, Y., Burmeister, O., & Weckert, J. (2015). Reasons Behind Unethical Behaviour In The Australian Ict Workplace. *Journal Of Information, Communication And Ethics In Society*, *13*(3/4), 235–255. Https://Doi.Org/10.1108/Jices-12-2014-0060

Andon, P., Free, C., & Scard, B. (2015). Pathways To Accountant Fraud: Australian Evidence And Analysis. *Accounting Research Journal*, *28*(1), 10–44. Https://Doi.Org/10.1108/Mbe-09-2016-0047

Aprila, N., Parhusip, L., & S, D. A. (2017). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi, Dan Moralitas Manajemen Terhadap Perilaku Tidak Etis Dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Simposium Nasional Akuntansi Xx*, 1–29.

Arifiyani, H. A., & Sukirno. (2012). Pengaruh Pengendalian Intern, Kepatuhan Dan Kompensasi Manajemen Terhadap Perilaku Etis Karyawan. *Jurnal Nominal*, *1*(1), 5–21.

Arista, L. L., Titisari, K. H., & Suhendro. (2016). Pengaruh Faktor - Faktor Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Pt. Pegadaian Area Surakarta. *Seminar Nasional Ienaco*, 864–871. Https://Doi.Org/Issn: 2337 – 4349

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Bartenputa, A. (2016). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Ketaatan Akuntansi Dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Skpd Kota Bukittinggi), 1–25.

Bestari, D. S., Azlina, N., & Julita. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening. *Jom Fekon*, *3*(1), 1436–1447.

Dewi, C. K. R., Surya, R. A. S., & Hasan, M. A. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi. *Jom Fekon*, *4*(1), 1443–1457.

Fachrunisa, A., Hasan, A., & Safitri, D. (2015). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, Dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Kampar). *Jom Fekon*, *2*(2). Https://Doi.Org/E-Issn 2355-6854

Fauwzi, M. G. H. (2011). *Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi , Moralitas Manajemen Terhadap Perilaku Tidak Etis Dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*. Univeritas Diponegoro.

Fitri, Y., & Nurazlina. (2016). Pengaruh Sistem Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Akuntansi, Asimteri Informasi Dan Moralitas Individu Terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening. *Jom Fekon*, *3*(1), 505–519. Https://Doi.Org/E-Issn 2355-6854

Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 21* (7th Ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2014a). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Menggunakan Partial Least Squares (Pls) Dilengkapi Software Martpls 3.0 Xlstat 2014 Dan Warpls 4.0* (4th Ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2014b). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (Pls) Dilengkapi Software Smartpls 3.0. Xlstat 2014 Dan Warppls 4.0* (4th Ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Griffin, Ricky W., & Ebert, Ronald J. 2006. Bisnis Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gupta, P. K., & Gupta, S. (2015). Corporate Frauds In India – Perceptions And Emerging Issues. *Journal Of Financial Crime*, *22*(1), 79–103. Https://Doi.Org/10.1108/Jfc-07-2013-0045

Hasmarini, D. P., & Yuniawan, A. (2008). Pengaruh Keadilan Prosedural Dan Di$Tributif Terhadap Kepuasan Kerja Dan Komitmen Afektif. *Jurnal Bisnis Dan Strategi*, *17*(1), 99–118.

Holmes, Arthur W. & David C. Burns, (1996), Auditing Norma Dan Prosedur, Edisi 9, Jilid 1, Jakarta : Erlangga, Hal 2

Indriani, I. (2016). Penerapan Konsep Fraud Diamond Theory Dalam Mendeteksi Full Paper.

Indriastuti, D. E., Agusdin, & Animah. (2016). Analisis Pengaruh Asimetri Informasi, Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Individu, Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Infestasi*, *12*(3), 115–130. Https://Doi.Org/P-Issn: 0216-9517

Kohlberg, L., & Hersh, R. H. (2013). Moral Development : A Review Of The Theory, *Xvi*(2), 52–59.

Kusumastuti, N. R. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening*. Universitas Diponegoro Semarang.

Lou, Y.-I., & Wang, M. (2009). Fraud Risk Factor Of The Fraud Triangle Assessing The Likelihood Of Fraudulent Financial Reporting. *Journal Of Business & Economics Research*, *7*(2), 61–78. Https://Doi.Org/10.19030/Jber.V7i2.2262

Muhammad, R., & Ridwan. (2017). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Akuntansi Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)*, *2*(4), 136–145. Https://Doi.Org/E-Issn 2581-1002

Mustika, D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Kabupaten Way Kanan Lampung. *Jurnal Akuntansi*, 1–22.

Najahningrum, A. F. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi Pegawai Dinas Provinsi Diy. *Accounting Analysis Journal*, *2*(3), 259–267. Https://Doi.Org/Issn 2252-6765

Norbarani, L. (2012). *Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Analisis Fraud Triangle Yang Diadopsi Dalam Sas No.99*. Universitas Diponegoro.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Novikasari, Y. (2017). Pengaruh Moralitas Individu, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Skpd Kab. Kuantan Singingi). *Jom Fekon*, *4*(1), 1516–1530.

Nurlaeliyah, S., & Anisykurlillah, I. (2017). Analysis Of Factors Affecting The Tendency Of Accounting Fraud With An Ethical Behavior As Intervening Variable. *Accounting Analysis Journal*, *6*(2), 299–312. Https://Doi.Org/Issn 2252-6765

Pramudita, A. (2013). Analisis Fraud Di Sektor Pemerintahan Kota Salatiga. *Accounting Analysis Journal*, *2*(1), 35–43. Https://Doi.Org/Issn 2252-6765

Pristiyanti, I. R. (2012). Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Sektor Pemerintahan. *Accounting Analysis Journal*, *1*(1), 1–14. Https://Doi.Org/Issn 2252-6765

Purnomo, Y. D., & Khafid, M. (2017). Analysis Of Factors Affecting The Tendency Of Accounting Fraud With The Mediation Of Ethical Behavior. *Accounting Analysis Journal*, *6*(2), 299–312. Https://Doi.Org/Issn 2252-6765

Putri, A. A. P. A. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, *3*(1), 61–74.

Putri, K. K., & Suryandari, D. (2017). Factors Affecting Fraud Trend : Perception Of Employees Of Semarang City Office, *6*(2), 288–298. Https://Doi.Org/Issn 2252-6765

Rae, K., & Subramaniam, N. (2008). Quality Of Internal Control Procedures Antecedents And Moderating Effect On Organisational Justice And Employee Fraud. *Managerial Auditing Journal*, *23*(2), 104–124. Https://Doi.Org/10.1108/02686900810839820

Rahmaidha, R., & Sukirno. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal , Ketaatan Aturan Akuntansi , Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Profita*, *4*, 1–14.

Rahmi, F., & Sovia, A. (2017). Dampak Sistem Pengendalian Internal, Prilaku Tidak Etis, Dan Moralitas Manajemen Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Perusahaan Developer Di Pekanbaru. *Jurnal Al-Iqtishad*, *I*(13), 48–66.

Rezaee, Z. (2005). Causes, Consequences, And Deterence Of Financial Statement Fraud. *Critical Perspectives On Accounting*, *16*(3), 277–298. Https://Doi.Org/10.1016/S1045-2354(03)00072-8

Rizky, M., & Fitri, F. A. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Penegakan Hukum, Dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)*, *2*(2), 10–20. Https://Doi.Org/E-Issn 2581-1002

Schuchter, A., & Levi, M. (2016). The Fraud Triangle Revisited. *Security Journal*, *29*(2), 107–121. Https://Doi.Org/10.1057/Sj.2013.1

Shintadevi, P. F. (2015). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening Pada Universitas Negeri Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Siregar, S. V., & Tenoyo, B. (2015). Fraud Awareness Survey Of Private Sector In Indonesia. *Journal Of Financial Crime*, *22*(3), 329–346. Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.1108/Jeim-07-2014-0077

Sukirman, & Sari, M. P. (2013). Model Deteksi Kecurangan Berbasis Fraud Triangle (Studi Kasus Pada Perusahaan Publik Di Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Auditing*, *9*(2), 199–225.

Sumbayak, J. S., Anisma, Y., & Hasan, M. A. (2017). Pengaruh Keadilan Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kecurangan (Fraud) (Studi Empiris Pada Kantor Cabang Utama Perusahaan Leasing Di Kota Pekanbaru). *Jom Fekon*, *4*(1), 3168–3182.

Tandaju, I. P., & Elim, I. (2015). Evaluasi Penerapan Pengendalian Intern Siklus Penerimaan Kas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *3*(1), 912–922. Https://Doi.Org/Issn 2303-1174

Tang, T. L.-P., & Chiu, R. K. (2003). Income, Money Ethic, Paysatisfaction, Commitment,And Unethical Behavior:Is The Love Of Moneythe Root Of Evil Forhong Kong Employees? *Journal Of Business Ethics*, *46*(1), 13–30. Https://Doi.Org/10.1023/A:1024731611490

Thoyibatun, S. (2009). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Tidak Etis Dan Kecenderungan Akuntansi Serta Akibatnya Terhadap Kinerja Organisasi. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, *16*(2), 245–260.

Tunggal, Amin Widjaja. 2013. *Corporate Fraud & Internal Control*. Jakarta: Harvarindo.

Wahyudin, A. (2015). *Metodologi Penelitian*. Unnes Press.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Widiutami, N. P. S., Sulindawati, N. L. G. E., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal , Ketaatan Aturan Akuntansi , Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi*, *7*(1).

Widyaswari, I. D. A. N., Yuniarta, G. A., & Sujana, E. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Se-Kecematan Susut. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, *8*(2).

Wulandari, R., & Suryandari, D. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. *Accounting Analysis Journal*, *5*(2), 76–85. Https://Doi.Org/Issn 2252-6765

Wulandari, Susi & Ahmad Zaky. 2015. Determinan Terjadinya Fraud Di Instansi Pemerintahan (Persepsi Pada Pegawai Bpk Ri Perwakilanprovinsi Ntb). *Jurnal Publikasi.* Universitas Brawijaya

Yadnya, M. D. K., Sinarwati, N. K., & Yuniarta, G. A. (2017). Pengendalian Internal , Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) (Studi Kasus Pada Ksp Kecamatan Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, *7*(1).

Yuli, D. (2013). Analisis Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Tidak Etis Staf Akuntansi (.

Yulianti, D. F., P, E. N. D., & Rofika. (2016). Pengaruh Moralitas Individu, Penegakan Hukum, Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *Jom Fekon*, *3*(1), 2177–2191. Https://Doi.Org/E-Issn 2355-6854

Zulkarnain, R. M. (2013). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Pada Dinas Kota Surakarta. *Accounting Analysis Journal*, *2*(1), 1–4. Https://Doi.Org/Issn 2252-6765

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG